



KARTU KELUARGA
No. 130105110890001

Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
MASRIL, S KOM	130105110890001	L	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
PENUNJAS PAINAN TAMBUR BUK A3 NO 1, PAINAN TAMBUR	130105110890002	L	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
PAINAN	130105110890003	L	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890004	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890005	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890006	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890007	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890008	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890009	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS
ASMAH, S KOM	130105110890010	P	PAINAN	15-03-1971	ISLAM	SD/SDA (STANTRAL)	PELAKSI BUKAN PNS

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



SATU KTP, KTP Nasional, SATU KTP, Satu Identitas
LEBIH DARI SATU KTP DAPAT SANKSI!
Hukum pidana: 1 Tahun penjara atau 2 Tahun tawanan atau 200 Denda

F.1-34
SUMATERA BARAT
PESISIR SELATAN
LINGSO SARI BAGANTI
LAGATI WILIS BGC

FORMULIR PERMOHONAN PINDAH WNI
Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi
No. 30 / RT-197 / 2017

DATA DAERAH ASAL
1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nama Kepala Keluarga
3. Alamat
4. Deskripsi Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kode Pos
7. Nama Lengkap
8. Nama Pekerjaan
9. Alamat Tempat Pindah
10. Deskripsi Kelurahan
11. Kecamatan
12. Kode Pos
13. Jenis Pekerjaan
14. Alamat RT
15. Alamat RW
16. Alamat Tempat Pindah

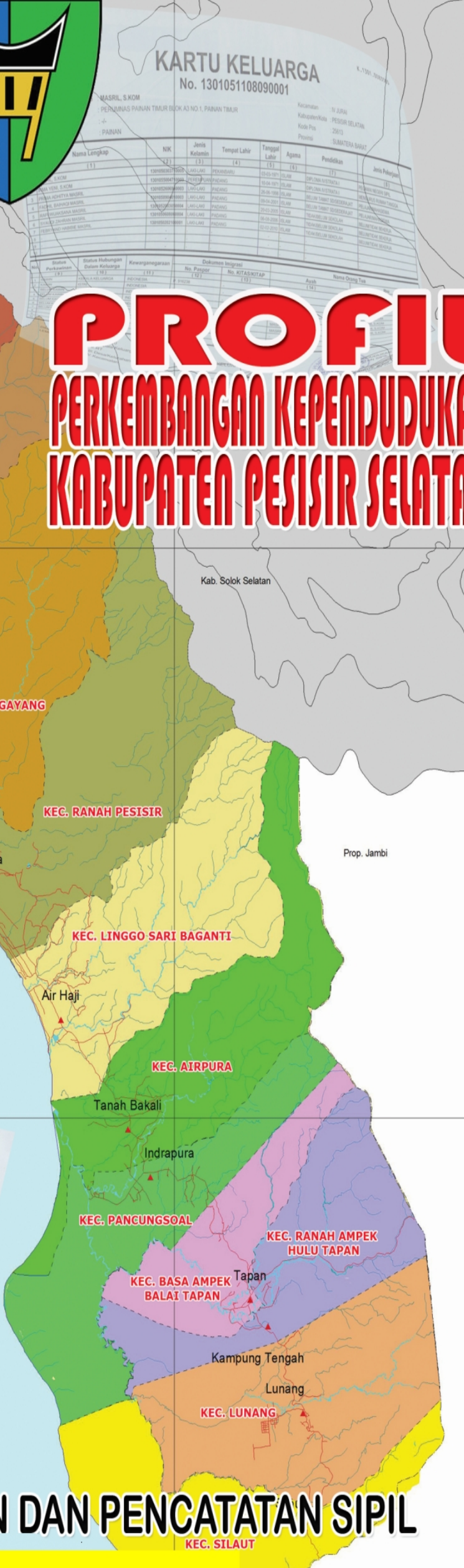
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN SAMPAN PANGRANG
DESA LINGSO SARI BAGANTI, KEC. LINGSO SARI BAGANTI, KAB. PESISIR SELATAN

SURAT KETERANGAN PINDAH WNI
DUP/130105110890001

DATA DAERAH ASAL
1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nama Kepala Keluarga
3. Alamat
4. Deskripsi Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kode Pos
7. Nama Lengkap
8. Nama Pekerjaan
9. Alamat Tempat Pindah
10. Deskripsi Kelurahan
11. Kecamatan
12. Kode Pos
13. Jenis Pekerjaan
14. Alamat RT
15. Alamat RW
16. Alamat Tempat Pindah



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEMESTER I TAHUN 2024



Prop. Bengkulu



KATA PENGANTAR

Pertama sekali mari kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Sholawat dan Salam kita persembahkan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari Alam Jahiliyah ke Alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Buku ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Dengan adanya Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2024, dan diharapkan pula agar dapat menjadi sumber data bagi yang membutuhkan dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Kebijakan secara umum untuk Kabupaten Pesisir Selatan khususnya mengenai gambaran tentang kondisi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi kuantitas, mobilitas dan persebaran penduduk.

Didasari keberadaan buku ini masih banyak kekurangan yang masih memungkinkan untuk dikritisi, diberikan saran yang konstruktif serta masukkan lainnya demi kesempurnaan penyajian dan penggunaan buku ini.



Ucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah bekerja secara maksimal guna menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini, mulai pengumpulan data, pengolahannya maupun mengeditingnya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan kepada pembaca diucapkan terima kasih atas saran dan masukan guna penyempurnaan dimasa datang.

Painan, Desember 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian Umum terhadap Istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	11
A. Letak Geografi	12
B. Penduduk	20
BAB III KUANTITAS PENDUDUK.....	21
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk	21
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	27
C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial	36
D. Keluarga	44
BAB IV KUALITAS PENDUDUK.....	56
A. Kelahiran dan Kematian	54
B. Ekonomi	57
BAB V MOBILITAS PENDUDUK.....	61
BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	65
A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	65
B. Kepemilikan Akta Kelahiran	67
C. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	70
BAB VII PENUTUP.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	22
Tabel 2	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah.....	24
Tabel 3	Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	26
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	27
Tabel 5	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur	29
Tabel 6	Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan	31
Tabel 7	Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua	33
Tabel 8	Rasio Ketergantungan Umur Muda dan Umur Tua Terhadap Umur Produktif	34
Tabel 9	Rasio Ketergantungan Per Kecamatan	35
Tabel 10	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin..	36
Tabel 11	Penduduk Menurut Agama	38
Tabel 12	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Per Jenis Kelamin.....	40
Tabel 13	Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur	43
Tabel 14	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	45
Tabel 15	Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga.....	47
Tabel 16	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin	48
Tabel 17	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin	50
Tabel 18	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Pendidikan Terakhir	52



Tabel 19	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin	54
Tabel 20	Rasio Anak Balita Terhadap Perempuan Usia 15 - 49 Tahun.....	56
Tabel 21	Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (15 - 64 Tahun)	58
Tabel 22	Angka Pengangguran	59
Tabel 23	Penduduk Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi	63
Tabel 24	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).....	66
Tabel 25	Kepemilikan Akta Kelahiran	69
Tabel 26	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)....	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	23
Grafik 2	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah.....	24
Grafik 3	Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	26
Grafik 4	Piramida Umur Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2016...	28
Grafik 5	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur.....	30
Grafik 6	Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	32
Grafik 7	Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua.....	33
Grafik 8	Rasio Ketergantungan Umur Muda dan Umur Tua Terhadap Umur Produktif.....	34
Grafik 9	Rasio Ketergantungan Per Kecamatan	35
Grafik 10	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	37
Grafik 11	Penduduk Menurut Agama.....	39
Grafik 12	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga.....	46
Grafik 13	Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga...	47
Grafik 14	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin.....	49
Grafik 15	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin	51
Grafik 16	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Pendidikan Terakhir	53
Grafik 17	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin.....	55
Grafik 18	Rasio Anak Balita Terhadap Perempuan Usia 15 - 49 Tahun	57
Grafik 19	Angka Pengangguran.....	60
Grafik 20	Penduduk Pindah Ke Kab/Kota dalam Propinsi dan Ke Luar Propinsi	64



Grafik 21	Penduduk Datang Dari Kab/Kota dalam Propinsi dan dari Luar Propinsi	64
Grafik 22	Kepemilikan Kartu Keluarga	67
Grafik 23	Kepemilikan Akta Kelahiran	69
Grafik 24	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan berbagai variable, agar tujuan pembangunan tersebut berhasil, pembangunan baik fisik maupun sosial merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memperhatikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang tidak memperhatikan pembangunan kependudukan, akan merugikan karena setiap keuntungan ekonomi akan digunakan untuk membiayai kebutuhan penduduk.

Dengan demikian untuk menunjang penyusunan perencanaan pembangunan yang baik, dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat, yang meliputi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk, agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan yang baik harus aspiratif terhadap data kependudukan dan memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting.

Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Nagari) menjadi factor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) yang disajikan sesuai kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.



Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesinambungan antara kuantitas, kualitas dan penyebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada Pasal 49 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Pendudukan berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri dan keluarganya termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh Pemerintah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Namun Pemerintah Pusat merencanakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), perlu ada peningkatan pelayanan masyarakat, keamanan Negara, serta peningkatan kualitas demokrasi dalam pemilu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah sepakat untuk melaksanakan dan menyukseskan 3 (tiga) program strategis nasional dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Tiga program tersebut adalah berupa (1) Pemutakhiran Data Kependudukan, (2) Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan (3) Penerapan KTP elektronik (KTP-el).

Data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informative dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil Perkembangan Kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.



B. Tujuan

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan;
3. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan dan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan masalah kependudukan, maka ruang lingkup penyusunan perkembangan kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan ini meliputi perkembangan kependudukan tahun 2023 dan tahun 2024 dengan cakupan data antara lain :

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Pengertian Umum terhadap Istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan

Dalam rangka memberikan kesamaan persepsi tentang beberapa istilah yang digunakan maka beberapa pengertian umum yang ada dalam penyusunan profil kependudukan ini adalah sebagai berikut :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;



2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat (LAMPID);
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
9. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II;
10. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;



12. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
13. Mobilitas penduduk non permanen (**circulation**/sirkuler) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (**commuting**) dan menginap;
14. Penduduk Musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domilisinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
15. Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (**commuting**) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
16. Migrasi kembali (**return migration**) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
17. Migrasi semasa hidup (**life time migration**) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
18. Migrasi Risen (**recent migration**) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
19. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perKabupatenan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perKabupatenan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perKabupatenan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
20. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;



21. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
22. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
23. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
24. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.
25. Angka partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
26. Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
27. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
28. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
29. Kegiatan lainnya adalah mereka yang sudah pensiun, orang-orang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan suatu pekerjaan.



30. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
31. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.
32. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja.
33. Jenis pekerjaan/jenis jabatan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara tidak bekerja, yang dibagi menjadi 8 golongan besar yaitu : 1) tenaga profesional, teknisi dan sebagainya; 2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3) tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis; 4) tenaga usaha penjualan; 5) tenaga usaha jasa; 6) tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan; 7) tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar; 8) lainnya.
34. Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan lain-lain.
35. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
36. Angka pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
37. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
38. Lahir hidup adalah
 - a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;



39. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
40. Angka Kelahiran Total (**Total Fertility Rate/TFR**) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
41. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
42. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
43. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
44. Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
45. Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
46. Pengeluaran untuk makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
47. Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
48. Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;
49. Angka Partisipasi Murni/APM adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-



18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

50. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
51. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;
52. Angka Pertumbuhan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
53. Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
54. Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
55. Piramida penduduk adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
56. Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun);
57. Rasio kepadatan penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
58. Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;



59. Angka Perkawinan umum adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
60. Angka Perceraian Kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;
61. Angka Perceraian Umum adalah angka yang menunjukkan Jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN



Kota Painan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 579.495 Ha terdiri atas 15

kecamatan, 182 nagari dan 480 kampung. Kelima belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan (01) Pancung Soal, (02) Ranah Pesisir, (03) Lengayang, (04) Batang Kapas, (05) IV Jurai, (06) Bayang, (07) Koto XI Tarusan, (08) Sutera, (09) Linggo Sari Baganti, (10) Lunang, (11) Basa Ampek Balai Tapan, (12) IV Nagari Bayang Utara, (13) Airpura, (14) Ranah Ampek Hulu Tapan, dan (15) Silaut,



Kecamatan Lengayang merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 5.749,89 km² atau 10,27 persen dari luas Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Kecamatan Bayang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 77,50 km² atau 1,35 km² dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama **Pesisir Selatan** berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, **afdeling zuid beneden landen** (dataran rendah bagian selatan). Ketika itu pada tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci menjadi **afdeeling** yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan.



Melalui UU Nomor : 12 Tahun 1956 daerah ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya berubah menjadi Pesisir Selatan saja.

A. Letak Geografi

Kabupaten Pesisir Selatan terletak antara $100^{\circ}19'$ – $101^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}59'$ – $2^{\circ}28,6'$ Lintang Selatan. Topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung-gunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Padang

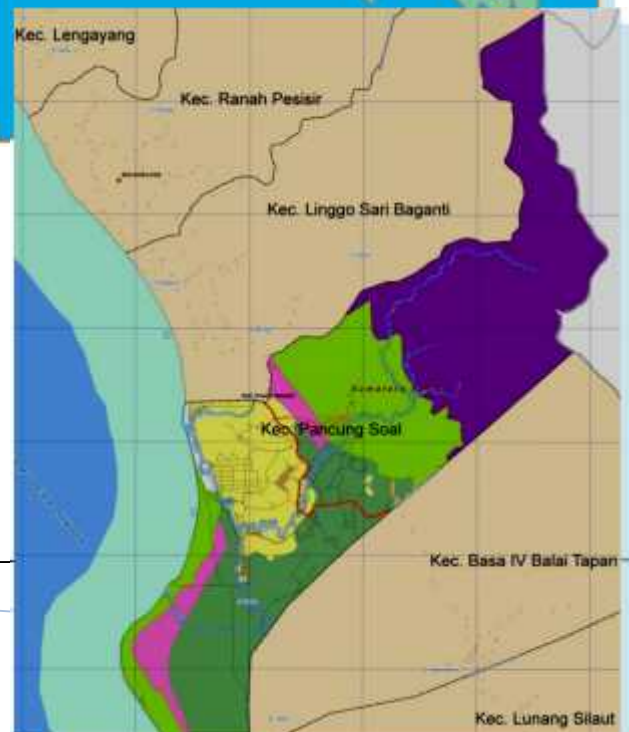
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Propinsi Jambi

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

1. **Kecamatan Pancung Soal (kode Kec 130101)**, berpusat di **Inderapura** sudah melakukan pemekaran wilayah dengan kecamatan Airpura, dari 20





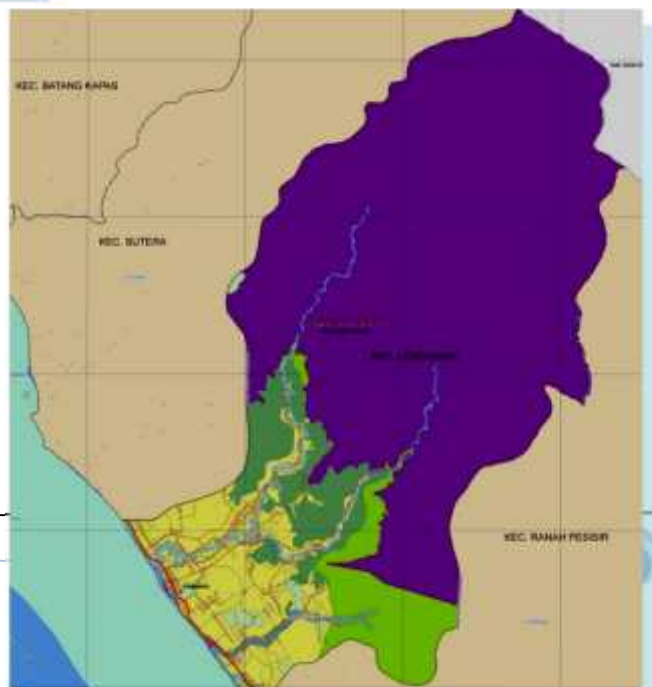
nagari menjadi 10 nagari yakni : Inderapura, Muaro Sakai Inderapura, Tiga Sepakat Inderapura, Inderapura Barat, Kudo-Kudo Inderapura, Inderapura Selatan, Simpang Lama Inderapura, Tigo Sungai Inderapura, Tluk Amplu Inderapura dan Inderapura Tengah.

2. **Kecamatan Ranah Pesisir (kode Kec 130102)**, Ibukota Kecamatannya **Balai Selasa**,



terdiri dari nagari Palangai (Balai Salasa) dan nagari Punggasan. Sekarang menjadi 10 nagari yakni : Pelangai, Sungai Tunu, Sungai Tunu Utara, Sungai Tunu Barat, Nyiur Melambai Pelangai, Sungai Liku Pelangai, Koto VIII Pelangai, Pelangai Gadang, Pelangai Kaciak, dan Pasia Pelangai.

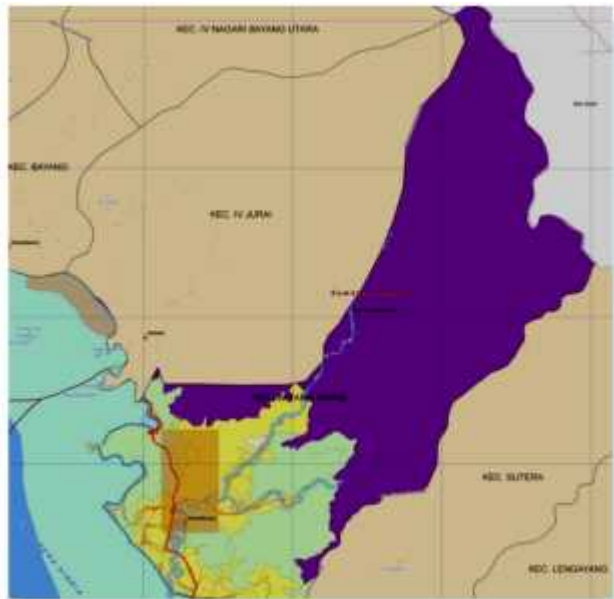
3. **Kecamatan Lengayang (Kode Kec 130103)**, terdiri dari dua nagari awal : Kambang dan Lakitan. **Kambang** merupakan Ibukota Kecamatan dengan wilayah asal penyebaran dari masyarakat Bandar Sepuluh. Nenek moyang dari Sungai Pagu turun melalui Kambang kemudian



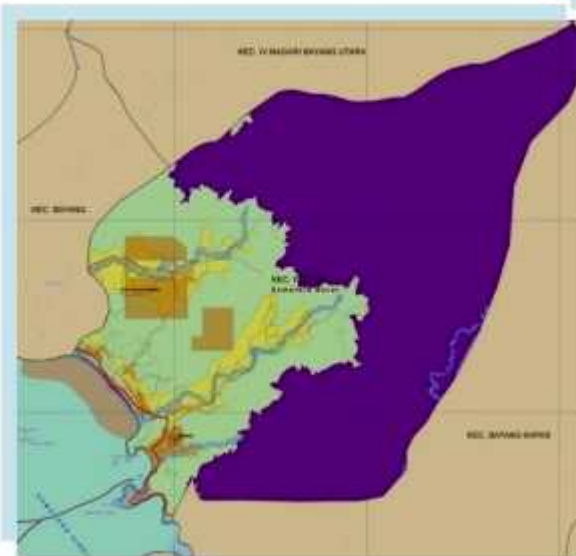


menyebar ke utara (Sutera dan Batang Kapas) dan sebagian menyebar ke selatan (Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti). Sekarang Lengayang dimekarkan menjadi 9 nagari yakni : Kambang, Lakitan, Kambang Utara, Kambang Timur, Kambang Barat, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Timur, dan Lakitan Tengah.

4. **Kecamatan Batang Kapas (Kode Kec 130104)**, merupakan kepala dari Bandar Sepuluh, terdiri dari 5 Nagari Yaitu Nagari IV Koto Hile, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hile Nagari IV Koto Mudiak, Nagari Taluak, dengan Ibukota Kecamatan **Pasar Kuok** dimekarkan menjadi 9 nagari yakni : IV Koto Hilie, IV Koto Mudiak, Taluk, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Teratak Tempatih IV Koto Mudiak, Tuik IV Koto Mudiak Sungai Nyalo IV Koto Mudiak, dan Taluk Tigo Sakato.



5. **Kecamatan IV Jurai (Kode Kec**



130105), Ibukota Kecamatannya **Salido** terdiri dari Lumpo, Sago, Salido dan Painan tapi sekarang sudah dimekarkan menjadi 20 nagari, yakni : Painan, Tambang, Salido, Lumpo, Bungo Pasang Salido, Sago Salido, Salido Sari Bulan, Koto Rawang, Limau Gadang Lumpo, Batu Kunik Lumpo, Taratak Tengah Lumpo, Ampuan Lumpo, Ampang Tareh Lumpo, Balai Sinayan Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Sungai Sariak Lumpo, Bukik Kaciak Lumpo, Gunung Bungkuak

Lumpo, Painan Selatan Painan, dan Painan Timur Painan. Disini terletaknya **pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan**, yaitu Painan.



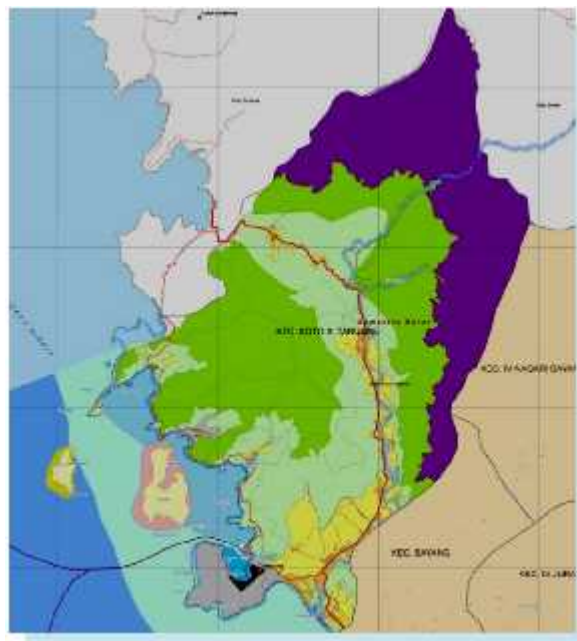
6. **Kecamatan Bayang (Kode Kec 130106)**, awalnya disebut sebagai nagari Bayang Nan



Tujuh karena terdiri dari tujuh koto, dengan Ibukota Kecamatan **Pasar Baru** kemudian dimekarkan menjadi 19 nagari, yakni : Koto Berapak, Talaok, Pasar Baru, Gurun Panjang, Api-Api Pasar Baru, Tanjung Durian Pasar Baru, Asam Kamba Pasar Baru, Sawah Laweh Pasar Baru, Kapeh Panji Jaya Talaok, Aur Begalung Talaok, Kapelgam Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kubang Koto Berapak, Kapujan Koto Berapak, Gurun Panjang Utara, Gurun Panjang Barat, dan Gurun Panjang Selatan.

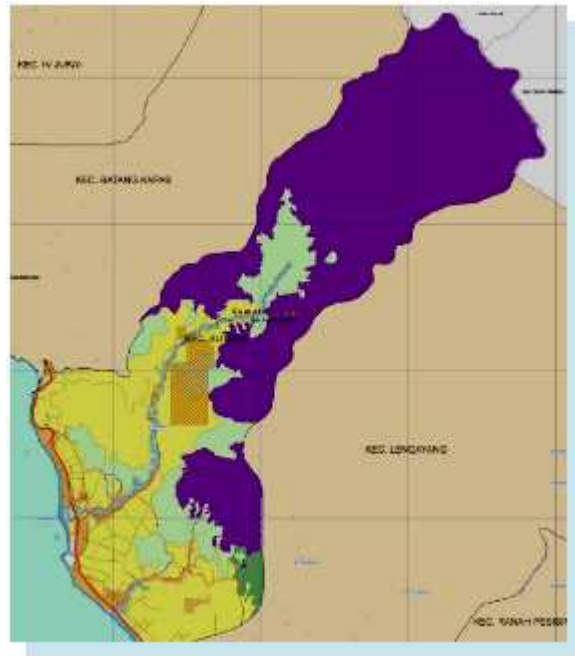
7. **Kecamatan Koto XI Tarusan (Kode Kec 130107)**, awalnya terdiri dari 11

koto. Dengan Ibukota Kecamatan Nanggalo, yang sekarang sudah dimekarkan menjadi 23 nagari, yakni : Siguntur, Sungai Pinang, Duku, Batu Hampar, Nanggalo, Ampang Pulai, Kapuh, Barung-Barung Balantai, Taratak Sungai Lundang, Barung-Barung Belantai Selatan, Mandeh, Kapuh Utara, Siguntur Tua, Kampung Baru Korong Nan IV, Duku Utara, Pulau Karam Ampang Pulai, Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Carocok Anau Ampang Pulai, Sungai Nyalo Mudik Aia, Batu Hampar Selatan, Barung-Barung Belantai Timur, Barung-Barung Belantai Tengah, dan Setara Nanggalo.

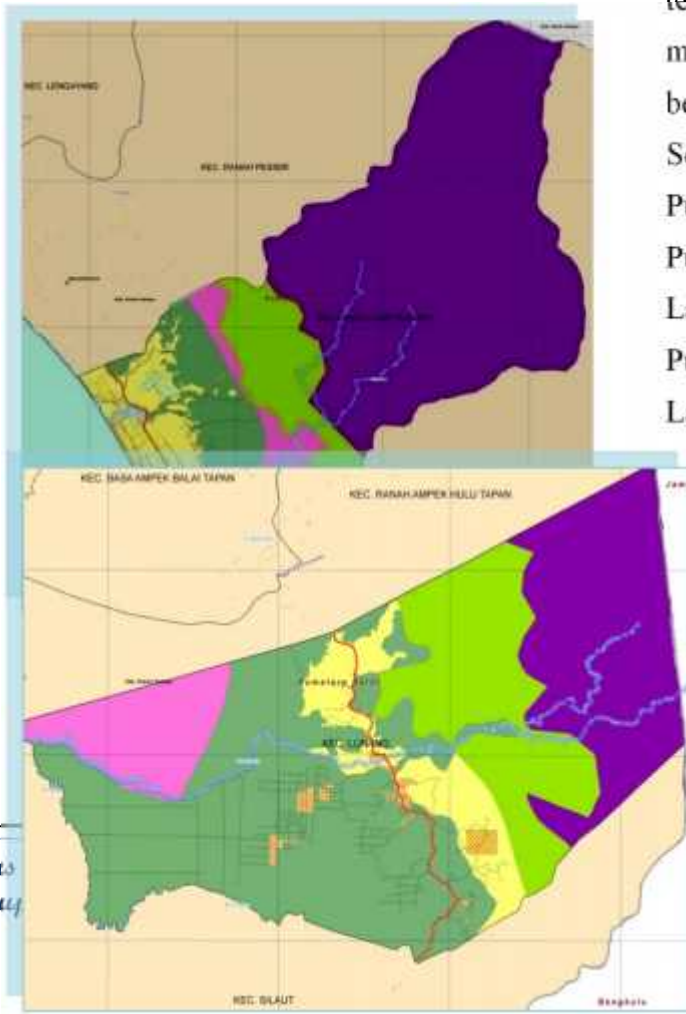




8. **Kecamatan Sutera (Kode Kec 130108)**, merupakan singkatan dari 3 nagari : Surantih, Taratak dan Ampiang Parak dengan Ibukota Kecamatan **Surantih**, dimekarkan menjadi 12 nagari, yakni : Taratak, Surantih, Amping Parak, Amping Parak Timur, Koto Taratak, Lansano Taratak, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo Surantih, Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Koto Nan Tigo Utara Surantih, Ganting Mudiak Selatan Surantih dan Ganting Mudiak Utara Surantih.



9. **Kecamatan Linggo Sari Baganti (Kode Kec 130109)** Ibukota Kecamatan **Air Haji**, terdiri dari Sungai Tunu dan Air Haji, merupakan ekor dari Bandar Sepuluh, berbatasan dengan wilayah Indojati. Sekarang menjadi 16 nagari yakni : Punggasan, Air Haji, Punggasan Utara, Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudik Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Air Haji Tenggara, Pasar Lama Muara Air Haji, Pasar Bukit Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji Tengah, Rantau Simalenang Air Haji, Muaro Gadang Air Haji, Sungai Sirah Air Haji, dan Muaro Kandis Punggasan,



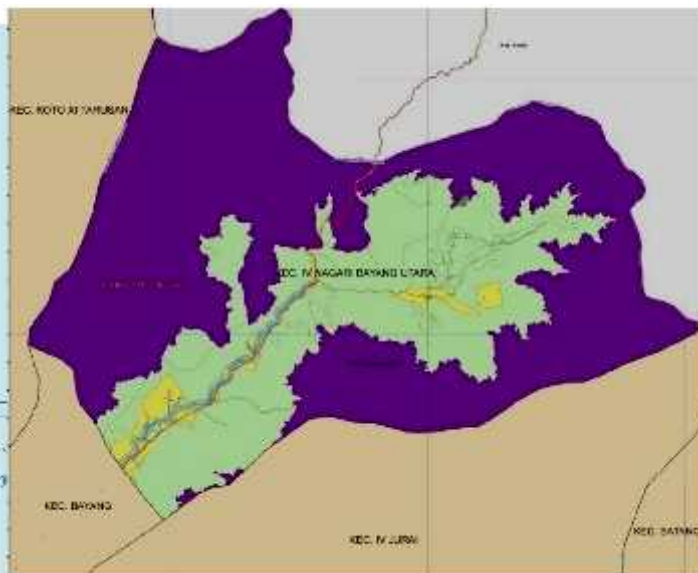
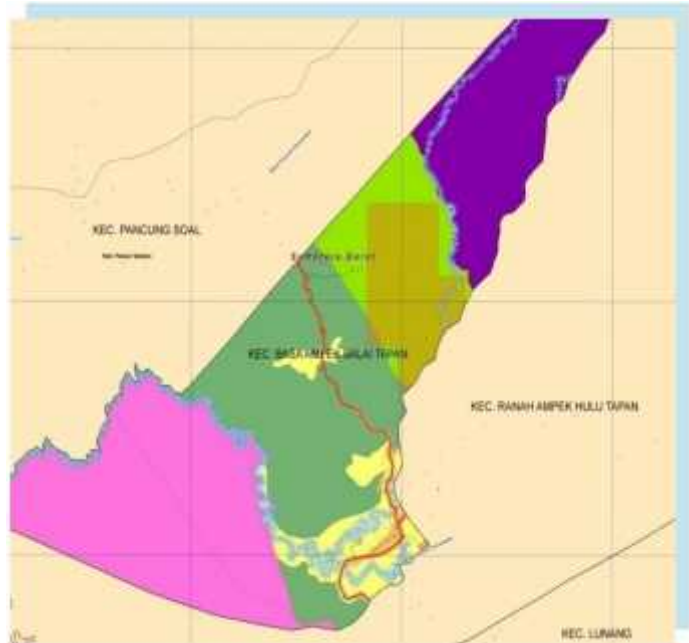
10. **Kecamatan Lunang (Kode**



Kec 130110), tempat berkedudukannya Mande Rubiah. Sebagian wilayah **Lunang** adalah daerah transmigrasi. Lunang menjadi 10 nagari yakni : Lunang, Lunang Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Sindang Lunang, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, Lunang Satu, Lunang Dua, dan Lunang Tiga.

11. **Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Kode Kec 130111)**, Ibukota Kecamatannya

Tapan yang merupakan wilayah tengah dari Indojadi menjadi 10 nagari yakni : Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan, Tanjung Pondok Tapan Batang Betung Tapan, Bukit Buai Tapan, Riak Danau Tapan, Koto Anau Tapan, dan Dusun Baru Tapan. Di Tapan terdapat persimpangan jalan menuju Kerinci, Padang dan Bengkulu.



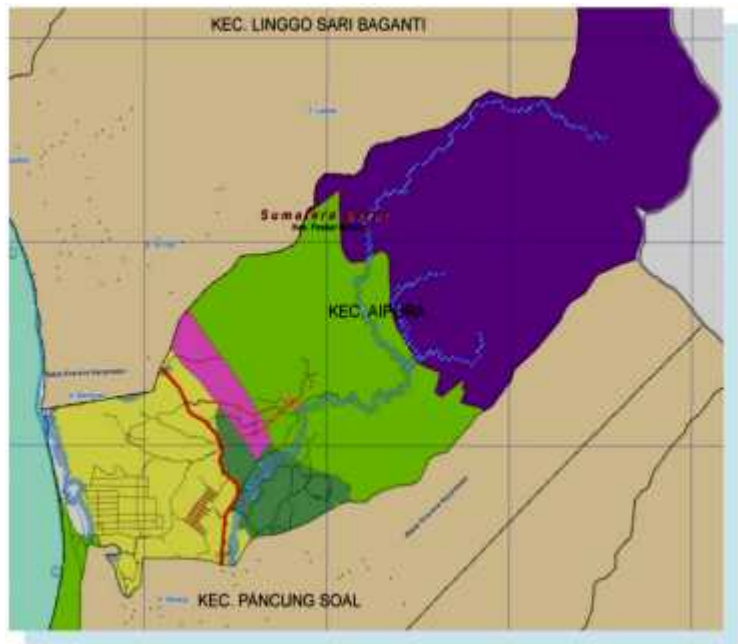
12. **Kecamatan Bayang Utara (Kode Kec 130112)**, Ibukota Kecamatannya **Asam Kumbang**, awalnya disebut Koto Nan Salapan, terdiri dari Pulut - Pulut, Muaro Air, Pancung Taba, Ngalau



Gadang, Limau-limau dan Taratak Nan Tigo (Teleng, Pisang dan Baru) dimekarkan menjadi 6 nagari, yakni : Puluik – Puluik Selatan, Puluik - Puluik, Koto Ranah, Muaro Aie, Pancung Taba, dan Limau Gadang Pancung Taba.

13. **Kecamatan Airpura (Kode**

Kec 130113), juga di wilayah Inderapura yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pancung Soal, dengan Ibukota Kecamatan **Tamuan** (Nagari Tanah Bakali) terdiri dari 10 pemerintahan nagari ; Inderapura Utara, Muara Inderapura, Damar Lapan Batang Inderapura, Lalang Panjang Inderapura, Palokan Inderapura, Lubuk Betung Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Inderapura Timur, dan Pulau Rajo Inderapura.



14. **Kecamatan Ranah Ampek**

Hulu Tapan (Kode Kec 130114), juga di wilayah Tapan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dengan Ibukota Kecamatan Pasar Beriang (Nagari Kampung Tengah Tapan) pemerintahan nagari ; Sungai Gambir Sako Tapan, Limau Purut

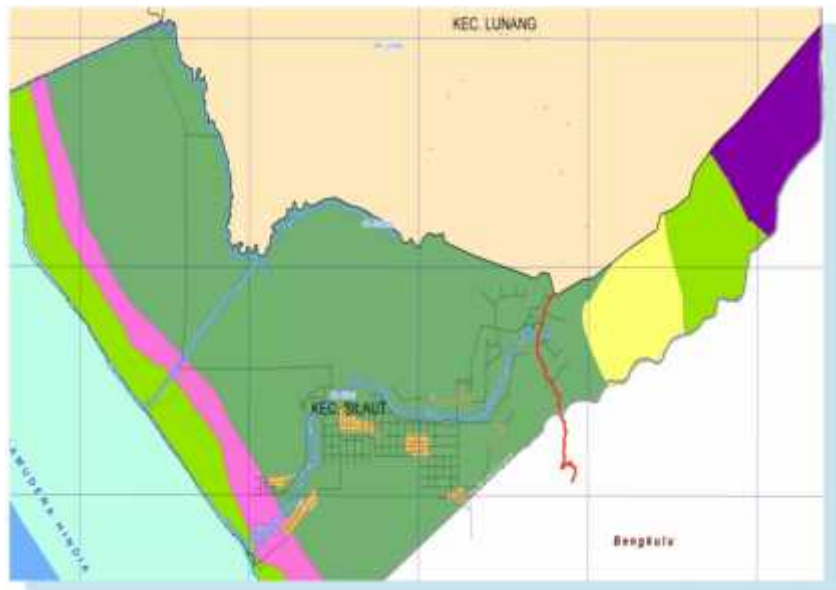




Tapan, Talang Balarik Tapan, Tebing Tinggi Tapan, Binjai Tapan, Sungai Pinang Tapan, Talang Koto Pulau Tapan, Kampung Tengah Tapan, Kubu Tapan, dan Simpang Gunung Tapan.

15. **Kecamatan Silaut (Kode Kec 130115)**, terdiri dari 10 nagari yang dimekarkan dari

Kecamatan Lunang Silaut dengan Ibukota Kecamatan **Silaut**, diantaranya pemerintahan Nagari ; Silaut, Sungai Sirah, Sungai Sarik, Sungai Pulau, Pasir Binjai Talang Binjai, Durian Seribu, Lubuk Bunta, Air Hitam, dan Sambungo. Sebagian besar wilayahnya merupakan



lahan transmigrasi. Silaut adalah daerah paling selatan Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

B. Penduduk

Kabupaten Pesisir Selatan berpenduduk pada tahun 2024 adalah 531.494 jiwa, terdiri dari 266.525 laki-laki dan 264.969 perempuan, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Penduduk terbesar di Kecamatan





Lengayang yaitu 63.635 jiwa, terdiri dari 31.796 laki-laki dan 31.839 perempuan dan terkecil di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 8.592 jiwa, terdiri dari 4.222 laki-laki dan 4.370 perempuan.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kuantitas penduduk adalah merupakan jumlah keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses demografi seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi/perpindahan penduduk. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah 5.749,89 km² didiami penduduk (keadaan Desember 2024) sebanyak 531.494 jiwa, terdiri dari 266.525 jiwa laki-laki dan 264.969 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 15 (lima belas) kecamatan yaitu (130101) **Kecamatan Pancung Soal**, (130102) **Kecamatan Ranah Pesisir**, (130103) **Kecamatan Lengayang**, (130104) **Kecamatan Batang Kapas**, (130105) **Kecamatan IV Jurai**, (130106) **Kecamatan Bayang**, (130107) **Kecamatan Koto XI Tarusan**, (130108) **Kecamatan Sutera**, (130109) **Kecamatan Linggo Sari Baganti**, (130110) **Kecamatan Lunang**, (130111) **Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan**, (130112) **Kecamatan IV Nagari Bayang Utara**, (130113) **Kecamatan Airpura**, (130114) **Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**, dan (130115) **Kecamatan Silaut**.



Pada table 1. Dibawah ini terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Lengayang yaitu 63.635 jiwa (12%), sedangkan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 8.592 Jiwa (1.6%).

Tabel 1. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

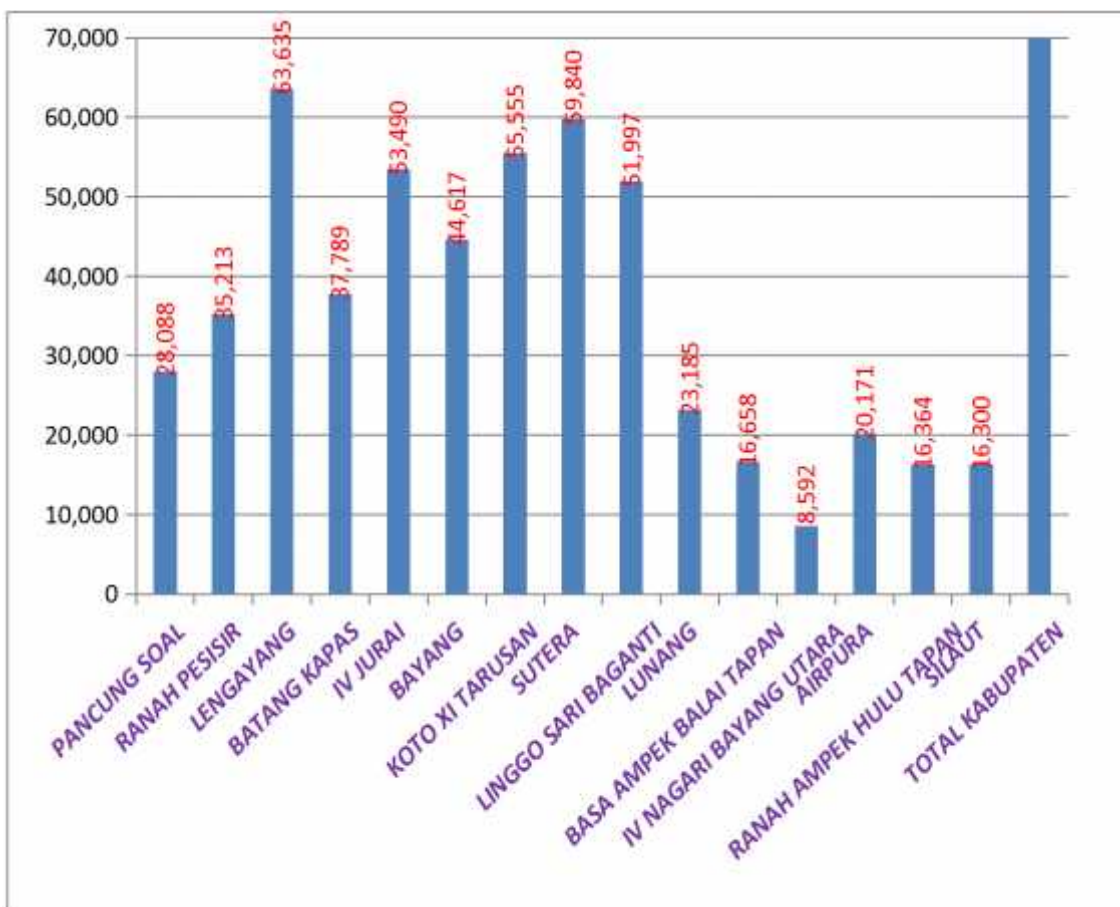
KECAMATAN	LK		PR		LK + PR	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
PANCUNG SOAL	14,169	2.7	13,919	2.6	28,088	5.3
RANAH PESISIR	17,329	3.3	17,884	3.4	35,213	6.6
LENGAYANG	31,796	6.0	31,839	6.0	63,635	12.0
BATANG KAPAS	18,830	3.5	18,959	3.6	37,789	7.1
IV JURAI	26,843	5.1	26,647	5.0	53,490	10.1
BAYANG	22,264	4.2	22,353	4.2	44,617	8.4
KOTO XI TARUSAN	27,880	5.2	27,675	5.2	55,555	10.5
SUTERA	30,128	5.7	29,712	5.6	59,840	11.3
LINGGO SARI BAGANTI	26,101	4.9	25,896	4.9	51,997	9.8
LUNANG	11,781	2.2	11,404	2.1	23,185	4.4
BASA AMPEK BALAI TAPAN	8,353	1.6	8,305	1.6	16,658	3.1
IV NAGARI BAYANG UTARA	4,222	0.8	4,370	0.8	8,592	1.6
AIRPURA	10,203	1.9	9,968	1.9	20,171	3.8
RANAH AMPEK HULU TAPAN	8,316	1.6	8,048	1.5	16,364	3.1
SILAUT	8,310	1.6	7,990	1.5	16,300	3.1
TOTAL KABUPATEN	266,525	50.1	264,969	49.9	531,494	100.0

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Untuk menggambarkan distribusi penduduk dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawa ini.



Grafik 1. Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan



2. Kepadatan Penduduk

Kecamatan Bayang tergolong kecamatan yang padat penduduk dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara kecamatan yang lebih sedikit kepadatan penduduknya adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.



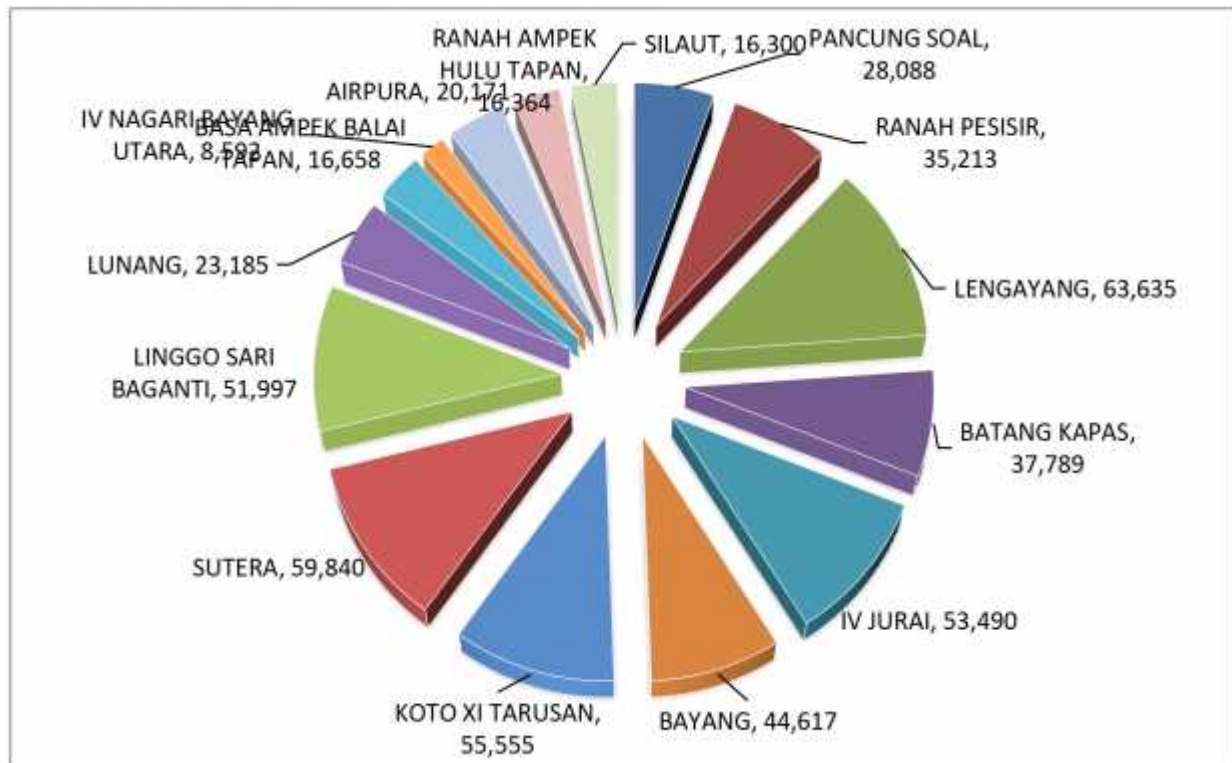
Tabel 2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan. dengan luas 5.749,89 km², Kabupaten Pesisir Selatan didiami oleh 531.494 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 92.44 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² Kabupaten Pesisir Selatan didiami sebanyak ± 92 jiwa/km².

TABEL 2. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Luas Wilayah

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN PENDUDUDUK (JIWA)
PANCUNG SOAL	28,088	426.10	65.92
RANAH PESISIR	35,213	564.39	62.39
LENGAYANG	63,635	590.60	107.75
BATANG KAPAS	37,789	359.07	105.24
IV JURAI	53,490	373.80	143.10
BAYANG	44,617	77.50	575.70
KOTO XI TARUSAN	55,555	425.63	130.52
SUTERA	59,840	445.65	134.28
LINGGO SARI BAGANTI	51,997	315.41	164.86
LUNANG	23,185	564.00	41.11
BASA AMPEK BALAI TAPAN	16,658	365.28	45.60
IV NAGARI BAYANG UTARA	8,592	250.74	34.27
AIRPURA	20,171	314.00	64.24
RANAH AMPEK HULU TAPAN	16,364	312.22	52.41
SILAUT	16,300	365.50	44.60
TOTAL KABUPATEN	531,494	5749.89	92.44

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Grafik 2. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah



Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Bayang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 575.70 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti sebesar 164.86 jiwa/km², Kecamatan IV Jurai sebesar 143.10 jiwa/km², Kecamatan Sutera sebesar 134.28 jiwa/km², Kecamatan Koto XI Tarusan sebesar 130.52 jiwa/km², Kecamatan Lengayang sebesar 107.75 jiwa/km², Kecamatan Batang Kapas sebesar 105.24 jiwa/km², Kecamatan Pancung Soal sebesar 65.92 jiwa/km², Kecamatan Airpura sebesar 64.24 jiwa/km², Kecamatan Ranah Pesisir sebesar 62.39 jiwa/km², Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebesar 52.41 jiwa/km², Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebesar 45.60 jiwa/km², Kecamatan Silaut yaitu sebesar 44.60 jiwa/km², dan Kecamatan Lunang sebesar 41.11 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebesar 34.27 jiwa/km².

Kabupaten Pesisir Selatan akan menjadi Kabupaten yang tidak merata pertumbuhan penduduknya yang berdampak terhadap tidak meratanya pembangunan dan tidak tertatanya tata ruang bangunan dengan baik. Terlihat dari kepadatan penduduk per



kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan harus menjadi perhatian, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan,

3. Pertumbuhan Penduduk

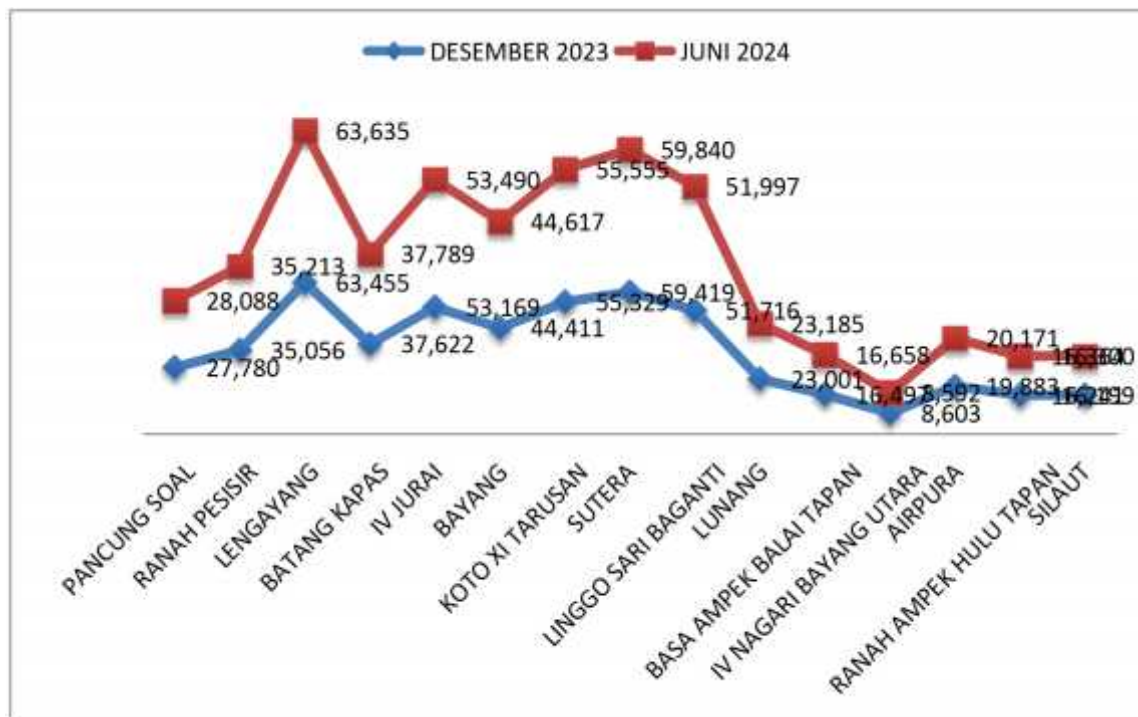
Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Angka penambahan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3. (Desember 2023 s/d Juni 2024)

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

KECAMATAN	DESEMBER 2023		JUNI 2024		PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
	JIWA	%	JIWA	%	
PANCUNG SOAL	27,780	5.3	28,088	5.3	1.109
RANAH PESISIR	35,056	6.6	35,213	6.6	0.448
LENGAYANG	63,455	12.0	63,635	12.0	0.284
BATANG KAPAS	37,622	7.1	37,789	7.1	0.444
IV JURAI	53,169	10.1	53,490	10.1	0.604
BAYANG	44,411	8.4	44,617	8.4	0.464
KOTO XI TARUSAN	55,329	10.5	55,555	10.5	0.408
SUTERA	59,419	11.2	59,840	11.3	0.709
LINGGO SARI BAGANTI	51,716	9.8	51,997	9.8	0.543
LUNANG	23,001	4.4	23,185	4.4	0.800
BASA AMPEK BALAI TAPAN	16,497	3.1	16,658	3.1	0.976
IV NAGARI BAYANG UTARA	8,603	1.6	8,592	1.6	-0.128
AIRPURA	19,883	3.8	20,171	3.8	1.448
RANAH AMPEK HULU TAPAN	16,241	3.1	16,364	3.1	0.757
SILAUT	16,199	3.1	16,300	3.1	0.623
TOTAL KABUPATEN	528,381	100	531,494	100	9.49



Grafik 3. Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan



B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dengan kesehatan dan lain-lain.

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	LK		PR		LK + PR	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%



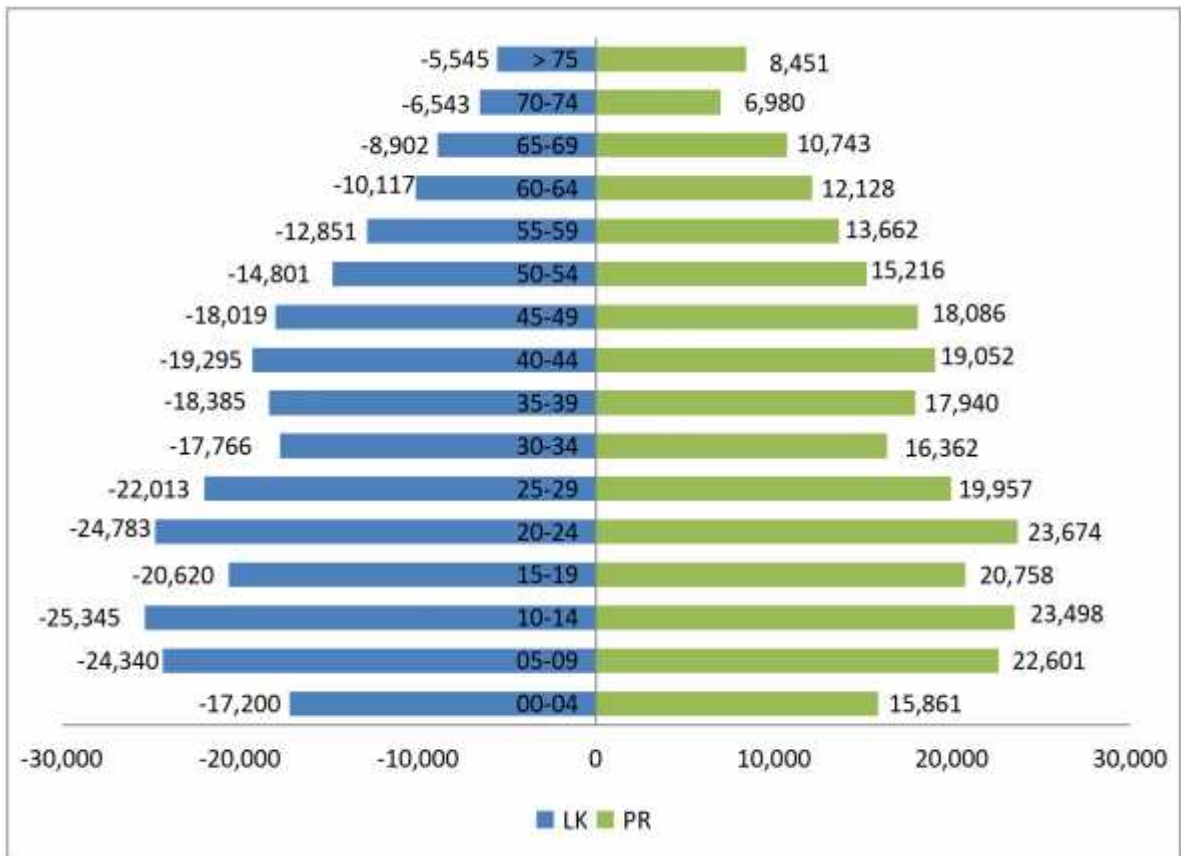
*Buku Profil Kependudukan Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan*

00-04	17,200	3.2	15,861	3.0	33,061	6.2
05-09	24,340	4.6	22,601	4.3	46,941	9.2
10-14	25,345	4.8	23,498	4.4	48,843	10.0
15-19	20,620	3.9	20,758	3.9	41,378	10.0
20-24	24,783	4.7	23,674	4.5	48,457	8.5
25-29	22,013	4.1	19,957	3.8	41,970	7.8
30-34	17,766	3.3	16,362	3.1	34,128	8.5
35-39	18,385	3.5	17,940	3.4	36,325	7.5
40-44	19,295	3.6	19,052	3.6	38,347	6.8
45-49	18,019	3.4	18,086	3.4	36,105	5.8
50-54	14,801	2.8	15,216	2.9	30,017	5.1
55-59	12,851	2.4	13,662	2.6	26,513	4.8
60-64	10,117	1.9	12,128	2.3	22,245	3.8
65-69	8,902	1.7	10,743	2.0	19,645	2.5
70-74	6,543	1.2	6,980	1.3	13,523	1.6
> 75	5,545	1.0	8,451	1.6	13,996	2.1
TOTAL KABUPATEN	266,525	50.15	264,969	49.85	531,494	100

Kelompok berusia kurang dari antara 10 -14 tahun yaitu 10% dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kelompok umur yang banyak. Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 6.2% penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berusia di bawah 9 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat juga digambar dengan grafik di bawah ini.

Grafik 4. Piramida Umur Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2024



2. Rasio Jenis Kelamin

Banyaknya jumlah penduduk dalam 100 perempuan ada 101 laki-laki. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur

KEMLOMPOK UMUR	LK	PR	SEX RATIO	KETERANGAN
00-04	17,200	15,861	108.4	Dlm 100 Pr ada 108 Lk
05-09	24,340	22,601	107.7	Dlm 100 Pr ada 108 Lk
10-14	25,345	23,498	107.9	Dlm 100 Pr ada 108 Lk



15-19	20,620	20,758	99.3	Dlm 100 Pr ada 99 Lk
20-24	24,783	23,674	104.7	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
25-29	22,013	19,957	110.3	Dlm 100 Pr ada 110 Lk
30-34	17,766	16,362	108.6	Dlm 100 Pr ada 109 Lk
35-39	18,385	17,940	102.5	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
40-44	19,295	19,052	101.3	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
45-49	18,019	18,086	99.6	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
50-54	14,801	15,216	97.3	Dlm 100 Pr ada 97 Lk
55-59	12,851	13,662	94.1	Dlm 100 Pr ada 94 Lk
60-64	10,117	12,128	83.4	Dlm 100 Pr ada 83 Lk
65-69	8,902	10,743	82.9	Dlm 100 Pr ada 83 Lk
70-74	6,543	6,980	93.7	Dlm 100 Pr ada 94 Lk
> 75	5,545	8,451	65.6	Dlm 100 Pr ada 66 Lk
TOTAL	266,525	264,969	100.6	Dlm 100 Pr ada 101 Lk

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2016

Dari tabel 5 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 100.6 yang berarti bahwa dari setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 103.2 atau 103 jiwa penduduk laki-laki. Jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok umur 50-54, 55-59, 70-74 dan 75 tahun ke atas.

Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 107.8 yang artinya terdapat 108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 65 tahun juga menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Grafik 5. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur





Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan

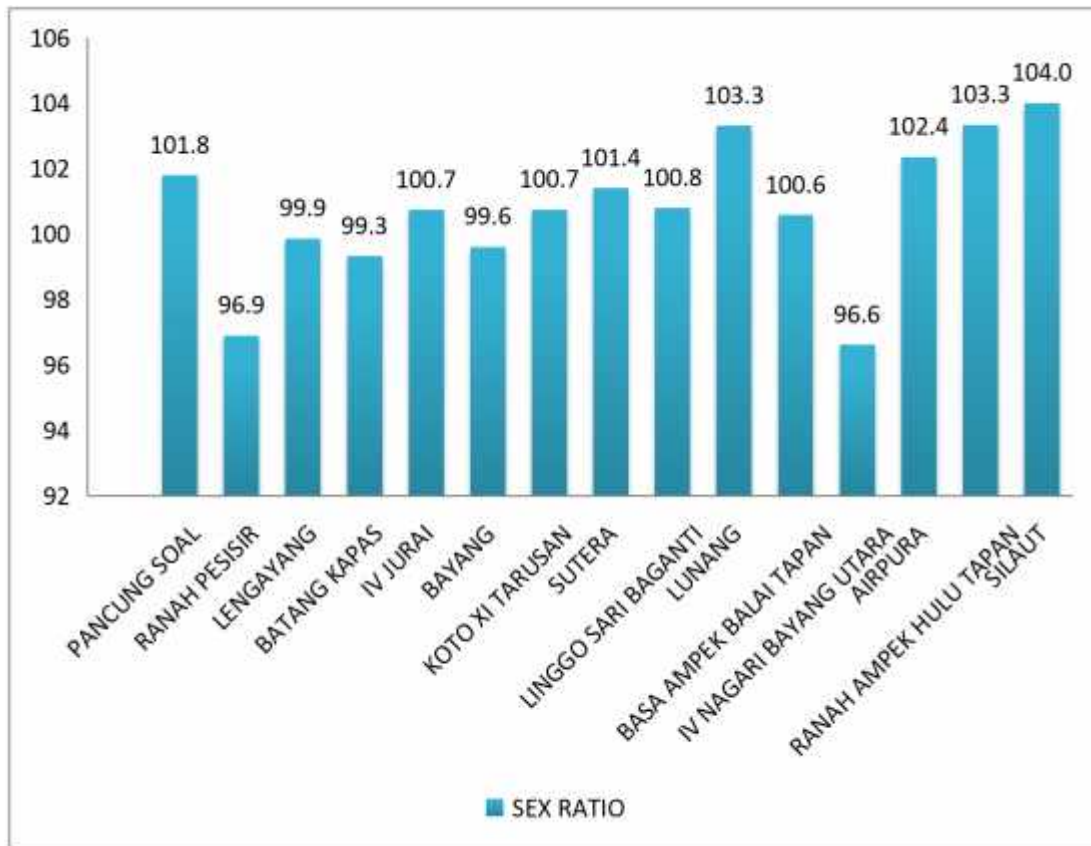
KECAMATAN	LK	PR	SEX RATIO	KETERANGAN
PANCUNG SOAL	14,169	13,919	101.8	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
RANAH PESISIR	17,329	17,884	96.9	Dlm 100 Pr ada 97 Lk
LENGAYANG	31,796	31,839	99.9	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
BATANG KAPAS	18,830	18,959	99.3	Dlm 100 Pr ada 99 Lk
IV JURAI	26,843	26,647	100.7	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
BAYANG	22,264	22,353	99.6	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
KOTO XI TARUSAN	27,880	27,675	100.7	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
SUTERA	30,128	29,712	101.4	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
LINGGO SARI BAGANTI	26,101	25,896	100.8	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
LUNANG	11,781	11,404	103.3	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
BASA AMPEK BALAI TAPAN	8,353	8,305	100.6	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
IV NAGARI BAYANG UTARA	4,222	4,370	96.6	Dlm 100 Pr ada 97 Lk
AIRPURA	10,203	9,968	102.4	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
RANAH AMPEK HULU TAPAN	8,316	8,048	103.3	Dlm 100 Pr ada 103 Lk
SILAUT	8,310	7,990	104.0	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
TOTAL KABUPATEN	266,525	264,969	100.6	Dlm 100 Pr ada 101 Lk

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada Table. 6. terlihat bahwa rasio jenis kelamin (**sex ratio**) di 10 (sepuluh) kecamatan di atas 100 dan 5 (lima) kecamatan di bawah 100. Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Silaut memiliki Rasio jenis kelamin tertinggi yaitu sebesar 104.0, diikuti Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan bernilai sama sebesar 103.3, Kecamatan Lunang sebesar 103.3, Kecamatan Airpura sebesar 102.4, Kecamatan Pancung Soal sebesar 101.8 , Kecamatan Sutera sebesar 101.4, Kecamatan Linggo Sari Baganti sebesar 100.8, Kecamatan Koto XI Tarusan sebesar 100.7 , Kecamatan IV Jurai sebesar 100.7, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan bernilai sama 100.6, Kecamatan Lengayang sebesar 99.9, Kecamatan Bayang sebesar 99.6, Kecamatan Batang Kapas sebesar 99.3 dan Kecamatan Ranah Pesisir sebesar 96.9, sedangkan Rasio jenis kelamin terendah 96.6 terdapat di Kecamatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.



Grafik 6. Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan



3. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15 – 64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi. Semakin rendah **Dependency Ratio**, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.



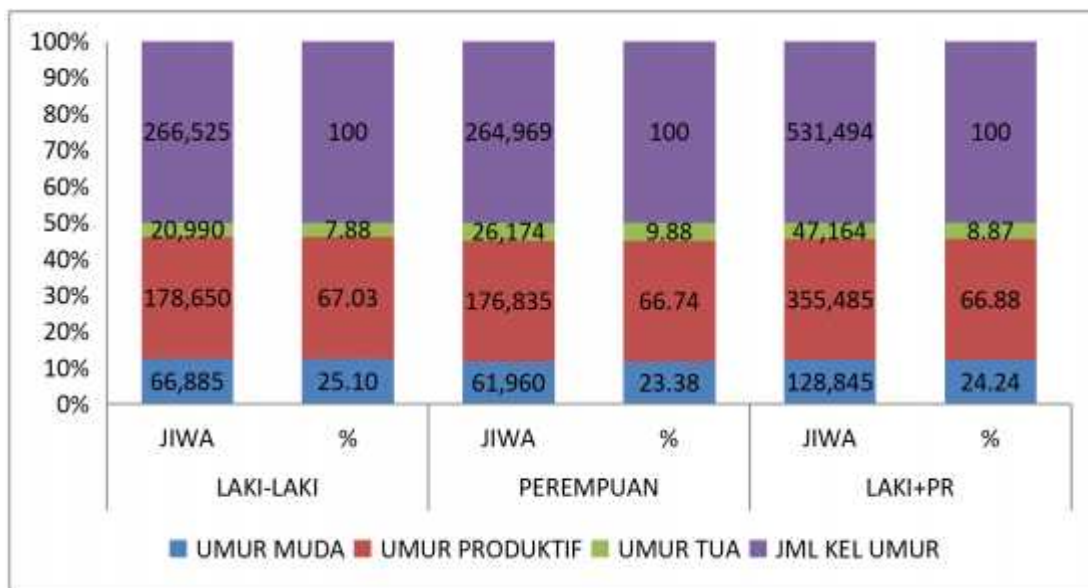
Tabel 7. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua

No	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI+PR	
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	00-14 TAHUN (UMUR MUDA)	66,885	25.10	61,960	23.38	128,845	24.24
2	15-64 TAHUN (UMUR PRODUKTIF)	178,650	67.03	176,835	66.74	355,485	66.88
3	>65 TAHUN (UMUR TUA)	20,990	7.88	26,174	9.88	47,164	8.87
	JUMLAH	266,525	100	264,969	100	531,494	100

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari Tabel. 7. nampak bahwa 66.88% penduduk Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penduduk Usia produktif (usia 15 – 64 tahun) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0 – 14 tahun) sebesar 24.24% dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (usia 65 tahun lebih) sebesar 8.87%. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih besar dari pada penduduk usia produktif perempuan. Hal yang berbeda terbalik terlihat pada kelompok usia tua. Sedangkan pada kelompok usia muda terlihat bahwa penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Grafik 7. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua





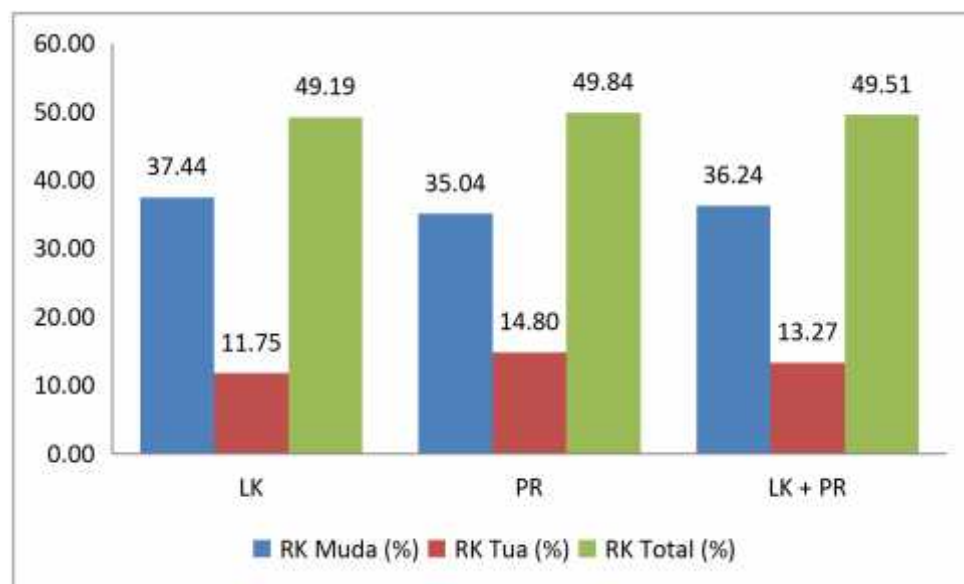
Tabel 8. Rasio Ketergantungan Umur Muda dan Umur Tua Terhadap Umur Produktif

RASIO KETERGANTUNGAN	LK	PR	LK + PR
RK Muda (%)	37.44	35.04	36.24
RK Tua (%)	11.75	14.80	13.27
RK Total (%)	49.19	49.84	49.51

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Bila dilihat dalam tabel komposisi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif, dan usia tua yang demikian, diketahui rasio ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 sebesar 49,51%, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tanggungan sekitar 49 jiwa penduduk usia non produktif. Rasio sebesar 49,51% disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk umur muda sebesar 36,24% dan rasio ketergantungan penduduk umur tua sebesar 13,27%. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan usia muda atau anak-anak yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total.

Grafik 8. Rasio Ketergantungan Umur Muda dan Umur Tua Terhadap Umur Produktif



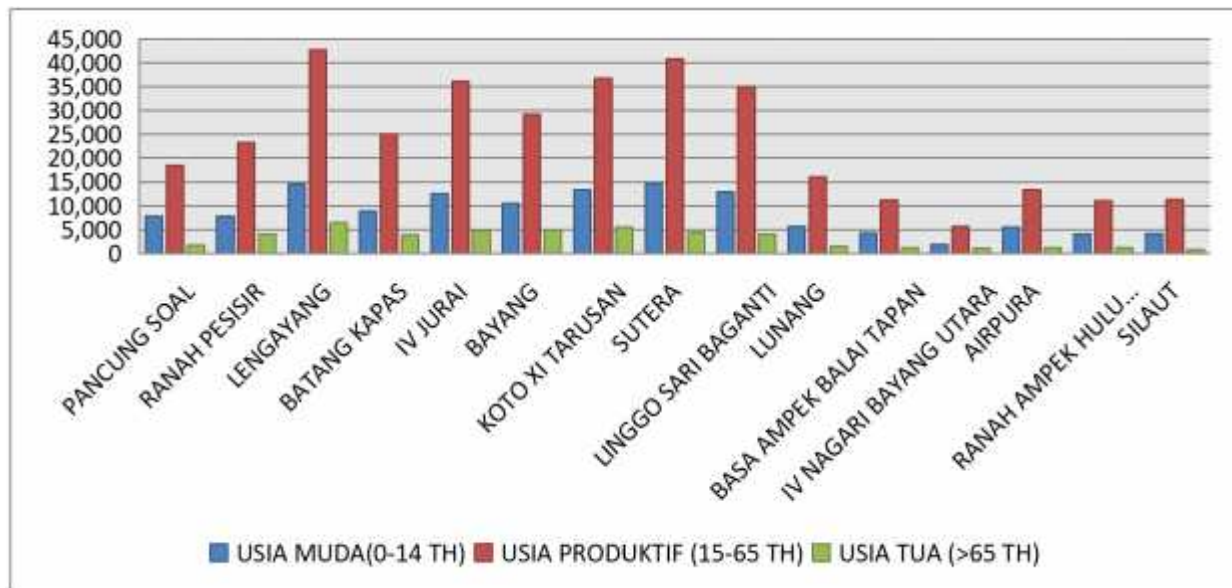


Tabel 9. Rasio Ketergantungan Per Kecamatan

No	KECAMATAN	USIA MUDA (0_14 TH)		USIA PRODUKTIF (15_65 TH)		USIA TUA (>65 TH)	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	PANCUNG SOAL	7,870	1.4	18,411	3.3	1,807	0.2
2	RANAH PESISIR	7,853	1.5	23,322	4.5	4,038	0.5
3	LENGAYANG	14,515	2.9	42,702	8.6	6,418	0.9
4	BATANG KAPAS	8,906	1.9	24,992	5.4	3,891	0.6
5	IV JURAI	12,548	2.5	36,047	6.7	4,895	0.6
6	BAYANG	10,502	2.1	29,137	5.9	4,978	0.7
7	KOTO XI TARUSAN	13,370	2.6	36,700	7.2	5,485	0.7
8	SUTERA	14,737	3.0	40,711	7.9	4,392	0.6
9	LINGGO SARI BAGANTI	12,884	2.5	35,003	6.8	4,110	0.5
10	LUNANG	5,648	1.1	16,025	2.8	1,512	0.2
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,313	0.9	11,168	2.3	1,177	0.2
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,907	0.4	5,617	1.2	1,068	0.2
13	AIRPURA	5,575	0.9	13,326	2.2	1,270	0.1
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,099	0.7	11,031	1.8	1,234	0.2
15	SILAUT	4,118	0.7	11,293	1.9	889	0.1
	TOTAL	128,845	25.3	355,485	68.5	47,164	6.1

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Grafik 9. Rasio Ketergantungan Per Kecamatan



Rasio ketergantungan total Kabupaten Pesisir Selatan jika dirinci menurut jenis kelamin, nampak bahwa angka beban tanggungan laki-laki lebih kecil daripada



perempuan, tetapi pada usia lanjut angka beban tanggungan perempuan menjadi lebih tinggi dari pada laki-laki. Perempuan yang berusia lanjut terus bertambah dan jumlahnya melebihi laki-laki karena usia perempuan relatif lebih panjang.

C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik **hard skill** maupun **soft skill**.

Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 10. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

TINGKAT PENDIDIKAN	LK		PR		LK + PR	
	JML	%	JML	%	JML	%
Tidak/Belum Sekolah	44,721	10.2	43,540	9.9	34,481	7.8
Belum Tamat SD/Sederajat	42,361	9.6	40,376	9.2	72,926	16.6
Tamat SD/Sederajat	54,463	12.4	55,864	12.7	118,620	26.9
SLTP/Sederajat	45,506	10.3	41,346	9.4	87,388	19.8
SLTA/Sederajat	67,404	15.3	61,605	14.0	105,780	24.0
Diploma I/II	753	0.2	1,748	0.4	3,619	0.8
Akademi/Diploma III/S. Muda	1,784	0.4	4,065	0.9	4,186	1.0
Diploma IV/Strata I	8,928	2.0	15,961	3.6	12,903	2.9
Strata II	592	0.1	446	0.1	550	0.1
Strata III	13	0.0	18	0.0	23	0.0
TOTAL KABUPATEN	266,525	60.51	264,969	60.16	440,476	100.00

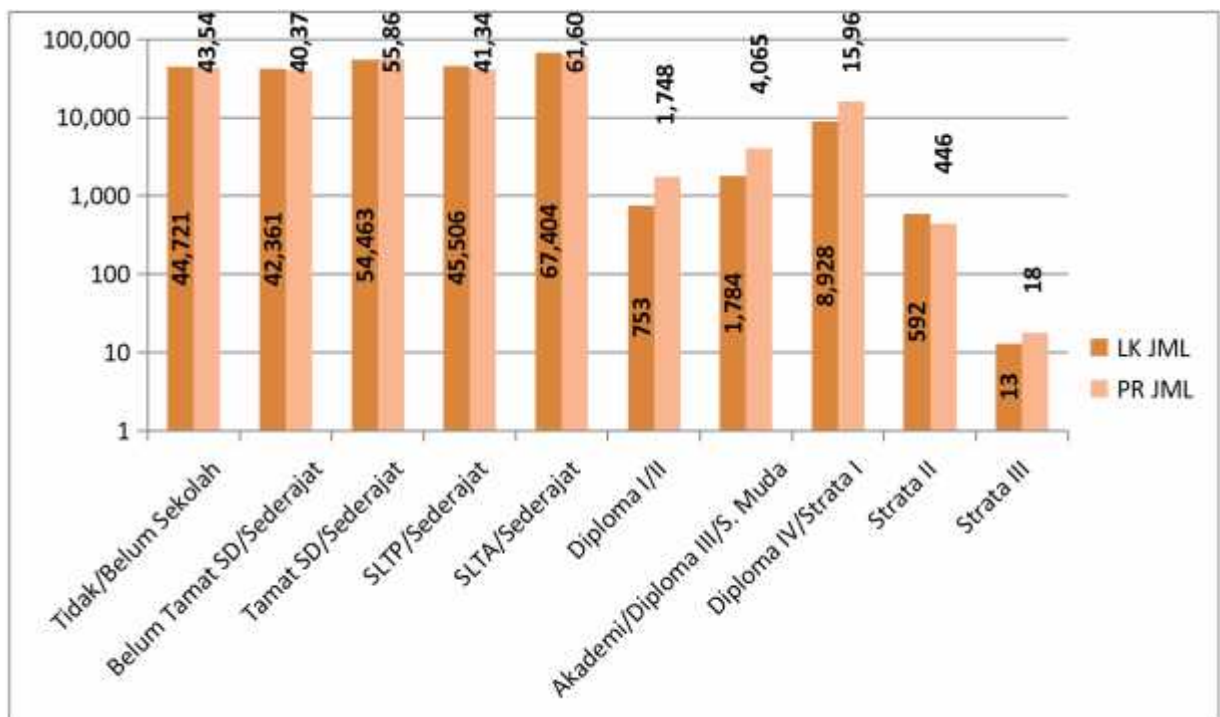
Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. Data SIAK menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan relatif cukup tinggi. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan (24%) tamat SLTA/Sederajat. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP/ sederajat sebesar 19.8% dan tamatan SD/ sederajat sebesar 26.9%.

Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya. Hal ini sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, terutama pada kelompok penduduk miskin.

Grafik 10. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin





Peningkatan pendidikan **vocasional**, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki ketrampilan khusus. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu memperhatikan kondisi di atas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh ke Indonesia.

2. Komposisi Penduduk menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya memeluk agama Islam (99,83%), disusul kemudian pemeluk agama Kristen (0,13%), agama Katholik (0,04%), agama Hindu dan agama Budha (0%).

Tabel 11. Penduduk Menurut Agama

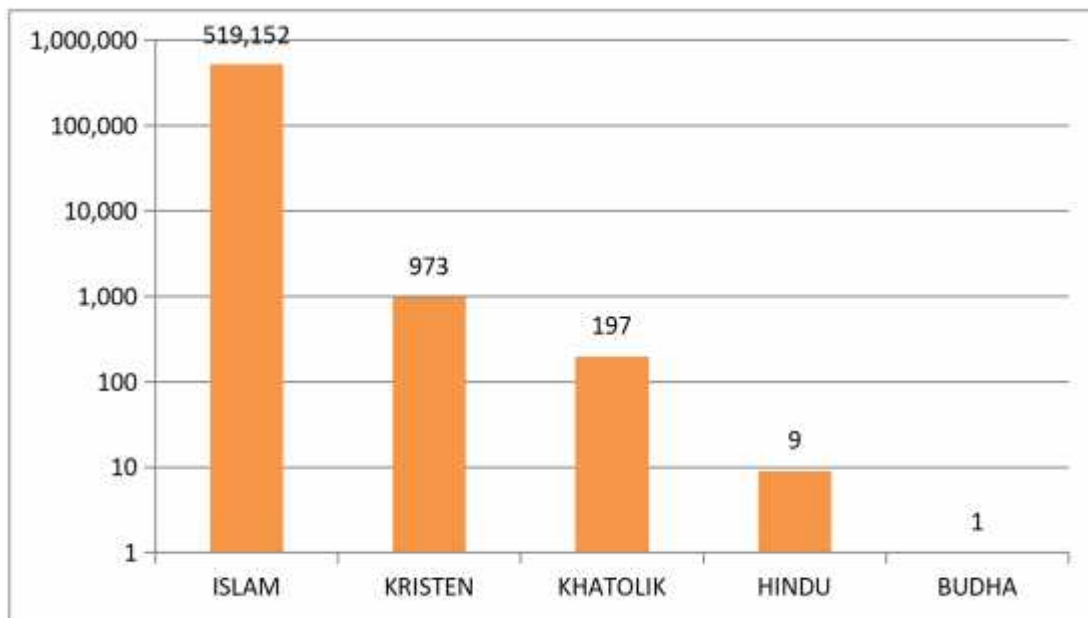
KECAMATAN	ISLAM		KRISTEN		KHATOLIK		HINDU		BUDHA	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
PANCUNG SOAL	27,881	4.85	188	0.01	19	0.00	1	0.0	-	0.0
RANAH PESISIR	35,143	6.55	56	0.02	14	0.00	2	0.0	-	0.0
LENGAYANG	63,615	12.37	14	0.00	6	0.00	0	0.0	-	0.0
BATANG KAPAS	37,780	7.92	8	0.01	1	0.00	0	0.0	-	0.0
IV JURAI	53,339	9.87	128	0.03	22	0.01	2	0.0	-	0.0
BAYANG	44,608	8.69	8	0.00	1	0.00	1	0.0	-	0.0
KOTO XI TARUSAN	55,546	10.57	-	0.00	-	0.00	0	0.0	1	0.0
SUTERA	59,838	11.46	2	0.00	-	0.00	1	0.0	-	0.0
LINGGO SARI BAGANTI	51,961	9.70	14	0.01	22	0.01	1	0.0	-	0.0
LUNANG	22,878	4.10	258	0.03	49	0.01	1	0.0	-	0.0
BASA AMPEK BALAI TAPAN	16,635	3.34	19	0.00	4	0.00	0	0.0	-	0.0
IV NAGARI BAYANG UTARA	8,592	1.77	-	0.00	-	0.00	0	0.0	-	0.0
AIRPURA	20,126	3.23	44	0.00	1	0.00	0	0.0	-	0.0
RANAH AMPEK HULU TAPAN	16,364	2.71	-	0.00	-	0.00	0	0.0	-	0.0
SILAUT	16,008	2.69	234	0.02	58	0.01	0	0.0	-	0.0
TOTAL KABUPATEN	519,152	99.83	973	0.13	197	0.04	9	0.0	1	0.0

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Jika dikaitkan dengan wilayah kecamatan, maka Agama Islam mendominasi semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Lengayang merupakan wilayah agama Islam terbesar yaitu 63.615 jiwa, Kecamatan Sutera yaitu 59.838 jiwa, Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu 55.546 jiwa, Kecamatan IV Jurai yaitu 53.339 jiwa, Kecamatan Linggo Sari Baganti yaitu 51.961 jiwa, diikuti Kecamatan Bayang yaitu 44.608 jiwa, Kecamatan Batang Kapas yaitu 37.780 jiwa, Kecamatan Ranah Pesisir yaitu 35.143 jiwa, Kecamatan Pancung Soal yaitu 27.881 jiwa, Kecamatan Lunang yaitu 22.878 jiwa, Kecamatan Airpura yaitu 20.126 jiwa, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yaitu 16.635 jiwa, , Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu 16.364 jiwa, dan diikuti Kecamatan Silaut yaitu 16.008 jiwa. Sedangkan sebaran agama Islam terkecil berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 8.592 jiwa.

Grafik 11. Penduduk Menurut Agama



Pemeluk Agama Islam sebanyak 519.152 jiwa, agama Kristen sebanyak 973 jiwa, pemeluk agama Khatolik sebanyak 197 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 9 jiwa dan pemeluk agama Budha sebanyak 1 jiwa.



3. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur perkawinan pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Per Jenis Kelamin

KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JML	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
LAKI-LAKI										
PANCUNG SOAL	7,782	2.9	6,086	2.3	146	0.1	155	0.1	14,169	5.3
RANAH PESISIR	8,634	3.2	8,252	3.1	183	0.1	260	0.1	17,329	6.5
LENGAYANG	16,285	6.1	14,826	5.6	237	0.1	448	0.2	31,796	11.9
BATANG KAPAS	9,858	3.7	8,414	3.2	177	0.1	381	0.1	18,830	7.1
IV JURAI	13,765	5.2	12,344	4.6	311	0.1	423	0.2	26,843	10.1
BAYANG	11,736	4.4	9,893	3.7	242	0.1	393	0.1	22,264	8.4
KOTO XI TARUSAN	15,211	5.7	11,911	4.5	290	0.1	468	0.2	27,880	10.5
SUTERA	15,794	5.9	13,673	5.1	297	0.1	364	0.1	30,128	11.3
LINGGO SARI BAGANTI	13,416	5.0	12,135	4.6	225	0.1	325	0.1	26,101	9.8
LUNANG	5,708	2.1	5,779	2.2	95	0.0	199	0.1	11,781	4.4
BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,391	1.6	3,754	1.4	112	0.0	96	0.0	8,353	3.1
IV NAGARI BAYANG UTARA	2,181	0.8	1,886	0.7	38	0.0	117	0.0	4,222	1.6
AIRPURA	5,397	2.0	4,585	1.7	116	0.0	105	0.0	10,203	3.8
RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,325	1.6	3,767	1.4	111	0.0	113	0.0	8,316	3.1
SILAUT	3,836	1.4	4,243	1.6	103	0.0	128	0.0	8,310	3.1
TOTAL KABUPATEN	138,319	51.9	121,548	45.6	2,683	1.0	3,975	1.5	266,525	100.0



*Buku Profil Kependudukan Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan*

KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JML	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
PEREMPUAN										
PANCUNG SOAL	6,379	2.4	6,105	2.3	330	0.1	1,105	0.4	13,919	5.3
RANAH PESISIR	7,092	2.7	8,408	3.2	456	0.2	1,928	0.7	17,884	6.7
LENGAYANG	12,952	4.9	15,208	5.7	775	0.3	2,904	1.1	31,839	12.0
BATANG KAPAS	7,987	3.0	8,537	3.2	501	0.2	1,934	0.7	18,959	7.2
IV JURAI	11,169	4.2	12,476	4.7	641	0.2	2,361	0.9	26,647	10.1
BAYANG	9,253	3.5	10,126	3.8	634	0.2	2,340	0.9	22,353	8.4
KOTO XI TARUSAN	12,144	4.6	12,176	4.6	666	0.3	2,689	1.0	27,675	10.4
SUTERA	12,593	4.8	13,812	5.2	820	0.3	2,487	0.9	29,712	11.2
LINGGO SARI BAGANTI	10,697	4.0	12,472	4.7	657	0.2	2,070	0.8	25,896	9.8
LUNANG	4,652	1.8	5,796	2.2	195	0.1	761	0.3	11,404	4.3
BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,593	1.4	3,764	1.4	239	0.1	709	0.3	8,305	3.1
IV NAGARI BAYANG UTARA	1,831	0.7	1,910	0.7	108	0.0	521	0.2	4,370	1.6
AIRPURA	4,408	1.7	4,594	1.7	300	0.1	666	0.3	9,968	3.8
RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,379	1.3	3,788	1.4	225	0.1	656	0.2	8,048	3.0
SILAUT	3,208	1.2	4,205	1.6	121	0.0	456	0.2	7,990	3.0
TOTAL KABUPATEN	111,337	42.0	123,377	46.6	6,668	2.5	23,587	8.9	264,969	100.0

KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JML	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
LAKI+PEREMPUAN										
PANCUNG SOAL	14,161	2.7	12,191	2.3	476	0.1	1,260	0.2	28,088	5.3
RANAH PESISIR	15,726	3.0	16,660	3.1	639	0.1	2,188	0.4	35,213	6.6
LENGAYANG	29,237	5.5	30,034	5.7	1,012	0.2	3,352	0.6	63,635	12.0
BATANG KAPAS	17,845	3.4	16,951	3.2	678	0.1	2,315	0.4	37,789	7.1
IV JURAI	24,934	4.7	24,820	4.7	952	0.2	2,784	0.5	53,490	10.1
BAYANG	20,989	3.9	20,019	3.8	876	0.2	2,733	0.5	44,617	8.4
KOTO XI TARUSAN	27,355	5.1	24,087	4.5	956	0.2	3,157	0.6	55,555	10.5
SUTERA	28,387	5.3	27,485	5.2	1,117	0.2	2,851	0.5	59,840	11.3
LINGGO SARI BAGANTI	24,113	4.5	24,607	4.6	882	0.2	2,395	0.5	51,997	9.8
LUNANG	10,360	1.9	11,575	2.2	290	0.1	960	0.2	23,185	4.4
BASA AMPEK BALAI TAPAN	7,984	1.5	7,518	1.4	351	0.1	805	0.2	16,658	3.1
IV NAGARI BAYANG UTARA	4,012	0.8	3,796	0.7	146	0.0	638	0.1	8,592	1.6
AIRPURA	9,805	1.8	9,179	1.7	416	0.1	771	0.1	20,171	3.8
RANAH AMPEK HULU TAPAN	7,704	1.4	7,555	1.4	336	0.1	769	0.1	16,364	3.1
SILAUT	7,044	1.3	8,448	1.6	224	0.0	584	0.1	16,300	3.1
TOTAL KABUPATEN	249,656	47.0	244,925	46.1	9,351	1.8	27,562	5.2	531,494	100.0

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Tabel.12. menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 10 tahun ke atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 46%. Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal disebabkan meninggal istrinya lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.



Tabel 13. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur.

KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
10-14	48,843	177.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48,843	10.8
15-19	41,285	149.8	93	0.0	0	0.0	0	0.0	41,378	9.2
20-24	42,660	154.8	5,721	1.3	62	0.0	14	0.0	48,457	10.7
25-29	21,993	79.8	19,618	4.3	305	0.1	54	0.0	41,970	9.3
30-34	6,903	25.0	26,559	5.9	538	0.1	128	0.0	34,128	7.6
35-39	3,773	13.7	31,354	6.9	895	0.2	303	0.1	36,325	8.0
40-44	2,035	7.4	34,624	7.7	1,076	0.2	612	0.1	38,347	8.5
45-49	1,060	3.8	32,583	7.2	1,301	0.3	1,161	0.3	36,105	8.0
50-54	486	1.8	26,664	5.9	1,128	0.2	1,743	0.4	30,021	6.6
55-59	273	1.0	22,364	5.0	1,110	0.2	2,766	0.6	26,513	5.9
60-64	137	0.5	17,218	3.8	1,028	0.2	3,862	0.9	22,245	4.9
65-69	91	0.3	13,623	3.0	863	0.2	5,068	1.1	19,645	4.4
70-74	47	0.2	8,482	1.9	556	0.1	4,438	1.0	13,523	3.0
> 75	72	0.3	6,022	1.3	489	0.1	7,413	1.6	13,996	3.1
TOTAL KABUPATEN	169,658	615.6	244,925	54.2	9,351	2.1	27,562	6.1	451,496	100.0

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Jika dikaitkan dengan umur nampak bahwa proporsi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 10-29 tahun cukup tinggi, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 30-54 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada umur 30-54 tahun, sementara penduduk yang berstatus cerai mati lebih banyak berada pada kelompok umur di atasnya yakni 55 tahun ke atas. Penduduk berumur muda yang cerai hidup biasanya segera melakukan perkawinan kembali sehingga proporsi mereka lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang berstatus cerai mati.

Penduduk usia remaja (10-19 Tahun) yang sudah berstatus kawin yang jumlahnya cukup tinggi yakni 93 orang. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan masalah kehamilan, persalinan dan paska melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).



D. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (**nuclear family**) dan keluarga luas (**extended family**). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan **sandwiches family**, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana system pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.



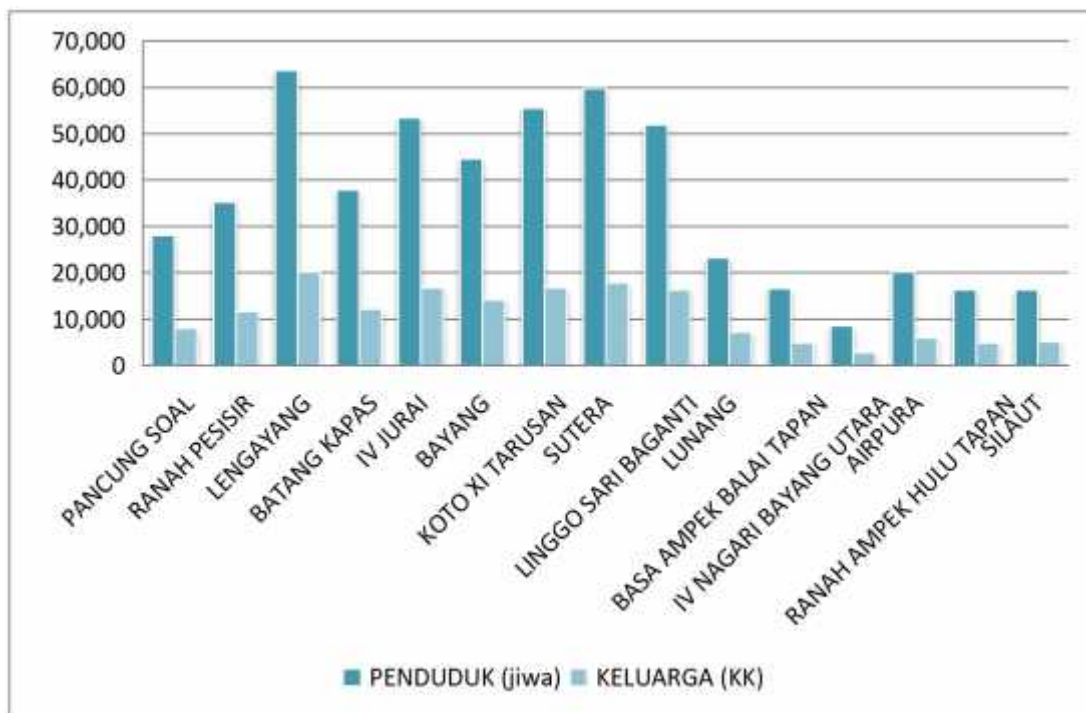
Tabel 14. Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga

KECAMATAN	PENDUDUK		KELUARGA		RATA2 ANGGOTA KELUARGA
	JIWA	%	KK	%	
PANCUNG SOAL	28,088	5.3	8,079	4.9	3.5
RANAH PESISIR	35,213	6.6	11,651	7.1	3.0
LENGAYANG	63,635	12.0	20,186	12.25	3.2
BATANG KAPAS	37,789	7.1	12,114	7.35	3.1
IV JURAI	53,490	10.1	16,679	10.1	3.2
BAYANG	44,617	8.4	14,153	8.6	3.2
KOTO XI TARUSAN	55,555	10.5	16,764	10.2	3.3
SUTERA	59,840	11.3	17,897	10.9	3.3
LINGGO SARI BAGANTI	51,997	9.8	16,374	9.9	3.2
LUNANG	23,185	4.4	7,204	4.4	3.2
BASA AMPEK BALAI TAPAN	16,658	3.1	4,911	3.0	3.4
IV NAGARI BAYANG UTARA	8,592	1.6	2,801	1.7	3.1
AIRPURA	20,171	3.8	6,001	3.6	3.4
RANAH AMPEK HULU TAPAN	16,364	3.1	4,818	2.9	3.4
SILAUT	16,300	3.1	5,156	3.1	3.2
TOTAL KABUPATEN	531,494	100.0	164,788	100.0	3.2

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Jumlah keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 164.788 keluarga yang tersebar di 15 kecamatan. Kecamatan Lengayang memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 20.186 keluarga (12.25%), kemudian disusul oleh Kecamatan Sutera sebanyak 17.897 keluarga (10.9%), Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 16.764 keluarga (10.2%), Kecamatan IV Jurai sebanyak 16.679 keluarga (10.1%), , Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 16.374 keluarga (9.9%), Kecamatan Bayang sebanyak 14.153 keluarga (8.6%), Kecamatan Batang Kapas sebanyak 12.114 keluarga (7.35%), Kecamatan Ranah Pesisir sebanyak 11.651 keluarga (7.1%), Kecamatan Pancung Soal sebanyak 8.079 keluarga (4.9%), Kecamatan Lunang sebanyak 7.204 keluarga (4.4%), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebanyak 4.911 keluarga (3.0%), Kecamatan Airpura sebanyak 4.818 keluarga (2.9%), Kecamatan Silaut 5.156 (3.1%), Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebanyak 4.818 keluarga (2.9%). Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.801 keluarga (1.7%)

Grafik 12. Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga



Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3,2 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang sampai dengan 4 orang. Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat digunakan pemerintah kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

3. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (**living arrangement**) dan pola pengasuhan anak. Dari Tabel. 15, nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 130.265 kepala keluarga laki-laki (25,4%) yang mempunyai isteri sebanyak 116.545 orang (22,71%). Sedangkan dari 34.523 kepala keluarga perempuan (6,7%). Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga



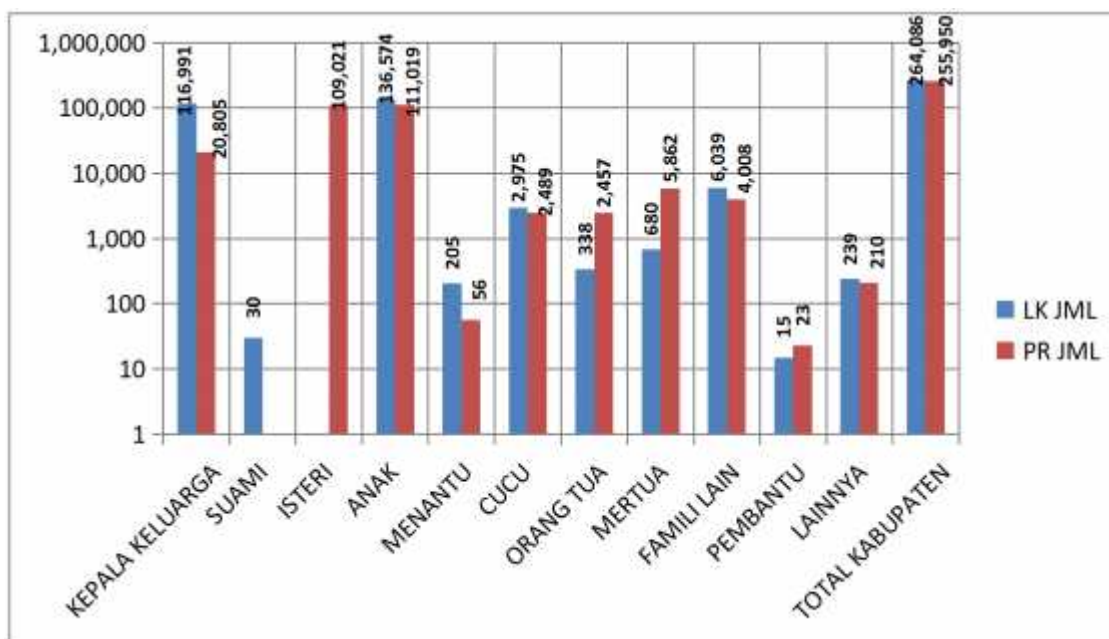
perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Tabel 15. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga

STATUS HUB DALAM KELUARGA	LK		PR		LK + PR	
	JML	%	JML	%	JML	%
KEPALA KELUARGA	130,265	25.38	34,523	6.73	164,788	31.00
SUAMI	4	0.00	0	0.00	4	0.00
ISTERI	0	0.00	116,545	22.71	116,545	21.93
ANAK	130,994	25.53	107,596	20.97	238,590	44.89
MENANTU	1	0.00	2	0.00	3	0.00
CUCU	1,886	0.37	1,498	0.29	3,384	0.64
ORANG TUA	85	0.02	761	0.15	846	0.16
MERTUA	250	0.05	2,157	0.42	2,407	0.45
FAMILI LAIN	2,889	0.56	1,745	0.34	4,634	0.87
PEMBANTU	2	0.00	-	0.00	2	0.00
LAINNYA	149	0.03	142	0.03	291	0.05
TOTAL KABUPATEN	266,525	51.93	264,969	51.63	531,494	100.00

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Grafik 13. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga





Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 4,9%. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (**extended family**) di Kabupaten Pesisir Selatan jumlahnya tidak besar. Namun demikian, perlu diperhatikan adalah keluarga luas yang dikepalai oleh perempuan, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki.

3. Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

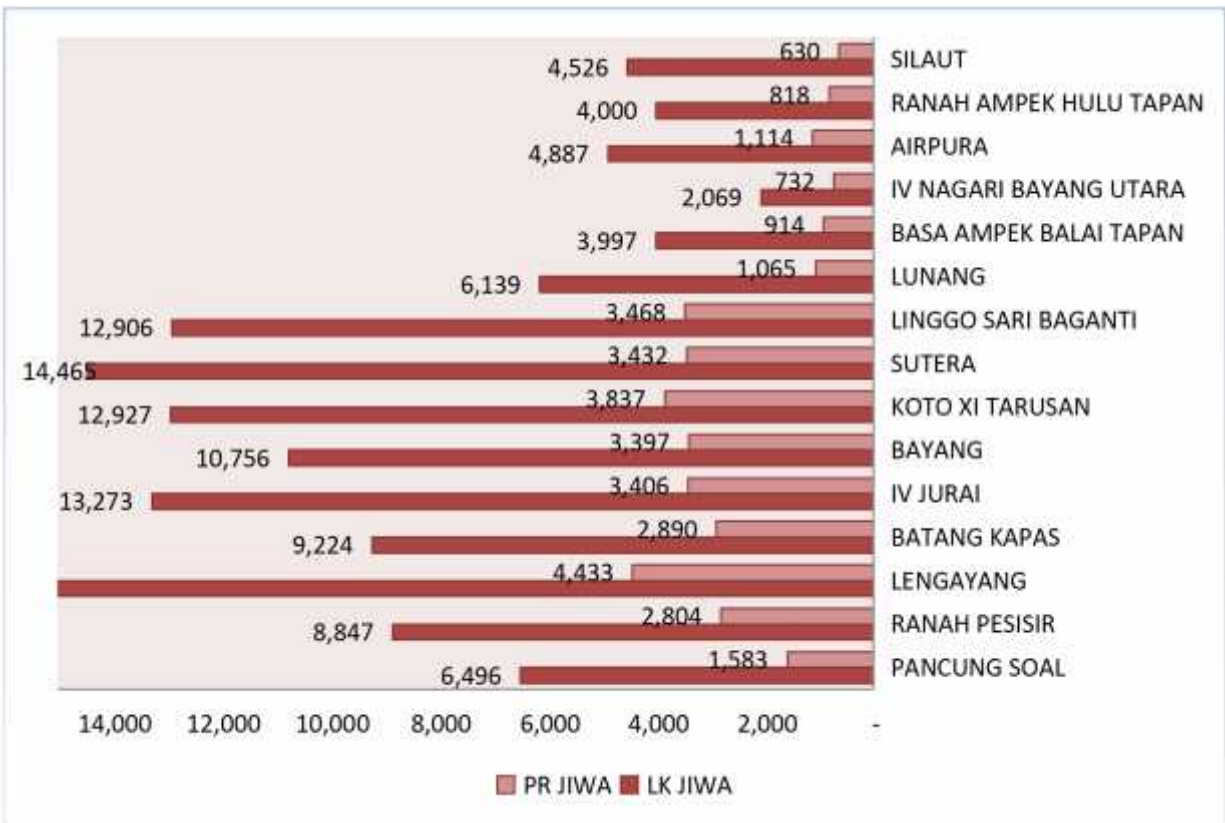
Tabel 16. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

KECAMATAN	LK		PR		LK + PR	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
PANCUNG SOAL	6,496	3.9	1,583	1.0	8,079	4.5
RANAH PESISIR	8,847	5.4	2,804	1.7	11,651	6.8
LENGAYANG	15,753	9.6	4,433	2.7	20,186	12.7
BATANG KAPAS	9,224	5.6	2,890	1.8	12,114	8.0
IV JURAI	13,273	8.1	3,406	2.1	16,679	10.1
BAYANG	10,756	6.5	3,397	2.1	14,153	8.7
KOTO XI TARUSAN	12,927	7.8	3,837	2.3	16,764	10.1
SUTERA	14,465	8.8	3,432	2.1	17,897	11.2
LINGGO SARI BAGANTI	12,906	7.8	3,468	2.1	16,374	9.8
LUNANG	6,139	3.7	1,065	0.6	7,204	4.3
BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,997	2.4	914	0.6	4,911	3.3
IV NAGARI BAYANG UTARA	2,069	1.3	732	0.4	2,801	1.9
AIRPURA	4,887	3.0	1,114	0.7	6,001	3.1
RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,000	2.4	818	0.5	4,818	2.7
SILAUT	4,526	2.7	630	0.4	5,156	2.9
TOTAL KABUPATEN	130,265	79.1	34,523	20.9	164,788	100.0

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Grafik 14. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin



Tabel. 16. Menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan adalah laki-laki yaitu 130.265 kepala keluarga, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 34.523 atau 20.9%, dengan perbandingannya sekitar 6 : 1, yang artinya dari 6 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan.



Tabel 17 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin

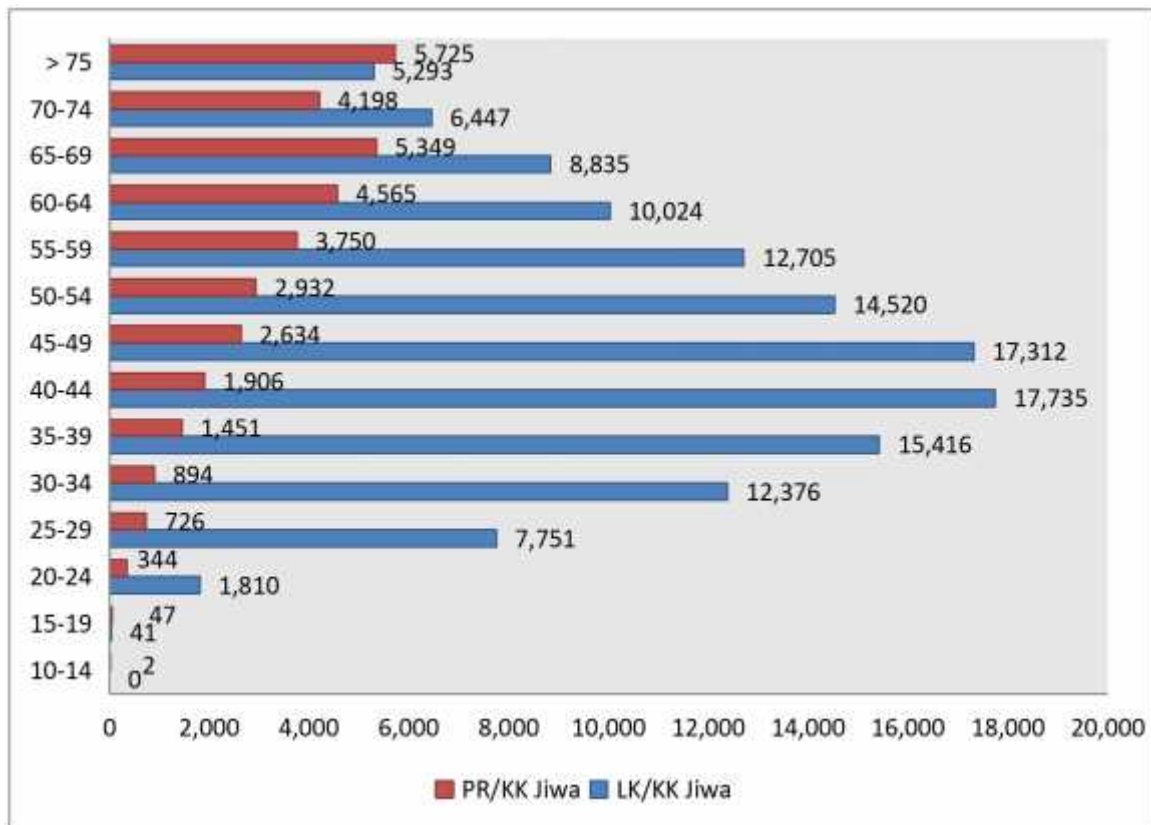
KELOMPOK UMUR	LK		PR		LK + PR	
	JML	%	JML	%	JML	%
10-14	0	0.0	2	0.0	2	0.0
15-19	41	0.0	47	0.0	88	0.1
20-24	1,810	1.1	344	0.2	2,154	1.3
25-29	7,751	4.7	726	0.4	8,477	5.1
30-34	12,376	7.5	894	0.5	13,270	8.1
35-39	15,416	9.4	1,451	0.9	16,867	10.2
40-44	17,735	10.8	1,906	1.2	19,641	11.9
45-49	17,312	10.5	2,634	1.6	19,946	12.1
50-54	14,520	8.8	2,932	1.8	17,452	10.6
55-59	12,705	7.7	3,750	2.3	16,455	10.0
60-64	10,024	6.1	4,565	2.8	14,589	8.9
65-69	8,835	5.4	5,349	3.2	14,184	8.6
70-74	6,447	3.9	4,198	2.5	10,645	6.5
> 75	5,293	3.2	5,725	3.5	11,018	6.7
TOTAL KABUPATEN	130,265	79.05	34,523	20.95	164,788	100.00

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari Table. 17. terlihat bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-59 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif dan yang menarik adalah adanya kepala keluarga pada kelompok umur di bawah 14 tahun yaitu 0 persen, walaupun persentasenya kecil namun perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan wajib belajar bagi anak usia sekolah.



Grafik 15. Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin



Proporsi tertinggi kepala keluarga berstatus kawin berada pada kepala keluarga yang berumur antara 30-59 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar juga berada pada kelompok umur 35-59 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 35-59 tahun, serta kepala keluarga berstatus cerai mati berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.



Tabel 18. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kelompok Pendidikan Terakhir

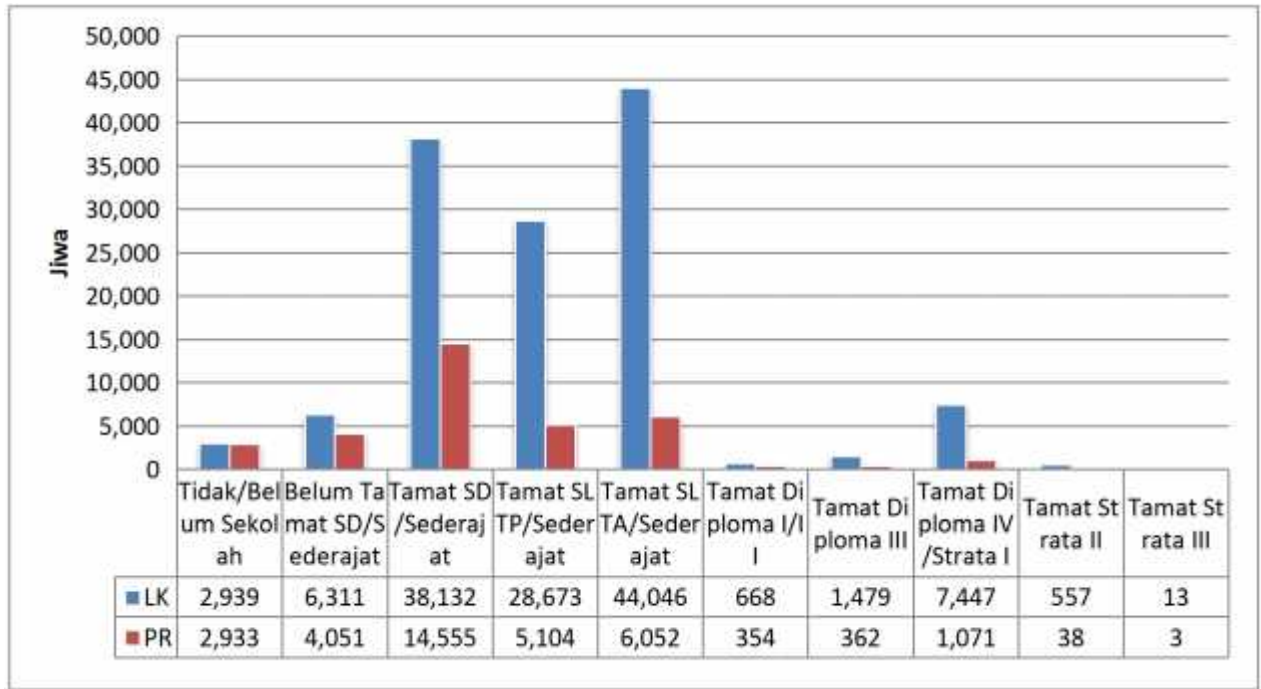
KELOMPOK PENDIDIKAN AKHIR	LK		PR		LK + PR	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
Tidak/Belum Sekolah	2,939	1.78	2,933	1.78	5,872	3.56
Belum Tamat SD/Sederajat	6,311	3.83	4,051	2.46	10,362	6.29
Tamat SD/Sederajat	38,132	23.14	14,555	8.83	52,687	31.97
Tamat SLTP/Sederajat	28,673	17.40	5,104	3.10	33,777	20.50
Tamat SLTA/Sederajat	44,046	26.73	6,052	3.67	50,098	30.40
Tamat Diploma I/II	668	0.41	354	0.21	1,022	0.62
Tamat Diploma III	1,479	0.90	362	0.22	1,841	1.12
Tamat Diploma IV/Strata I	7,447	4.52	1,071	0.65	8,518	5.17
Tamat Strata II	557	0.34	38	0.02	595	0.36
Tamat Strata III	13	0.01	3	0.00	16	0.01
TOTAL	130,265	79.05	34,523	20.95	164,788	100.00

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari Tabel. 18. terlihat bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan SD/Sederajat sebesar 31,97%, disusul dengan tamatan SLTA/Sederajat sebesar 30,40%, dan SLTP/Sederajat sebesar 20,50%, belum tamat SD/ sederajat sebesar 6,29%, tidak/belum sekolah sebesar 3,56%, tamat Diploma IV/S1 sebesar 5,17%, tamat Diploma III sebesar 1,12%, tamat Diploma I/II sebesar 0,62%, tamat Strata II sebesar 0,36%, dan Strata III sebesar 0,01%. Jadi rata-rata kepala keluarga penduduk Kabupaten Pesisir Selatan masih berpendidikan SD/ sederajat.



Grafik 16. Jumlah Kepala Keluarga menurut Kelompok Pendidikan Terakhir



Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga akan berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan agar mempunyai daya saing global, sehingga dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan segera berlangsung. Hal ini tentu harus memperoleh perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewajibkan anak didiknya belajar sembilan tahun, itu artinya Kepala Keluarga minimal harus tamat SLTP/sederajat.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.



Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa banyak kepala keluarga perempuan yang tidak bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki., maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Tabel 19. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin

KELOMPOK JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK+PR	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
BELUM/TIDAK BEKERJA	1,232	0.95	1,557	4.51	2,789	1.69
PELAJAR/MAHASISWA	639	0.49	411	1.19	1,050	0.64
MENGURUS RUMAH TANGGA	11	0.01	27,255	78.95	27,266	16.55
BEKERJA	126,733	97.29	4,540	13.15	131,273	79.66
PENSIUNAN	1,650	1.27	760	2.20	2,410	1.46
TOTAL KABUPATEN	130,265	100.00	34,523	100.00	164,788	100.00

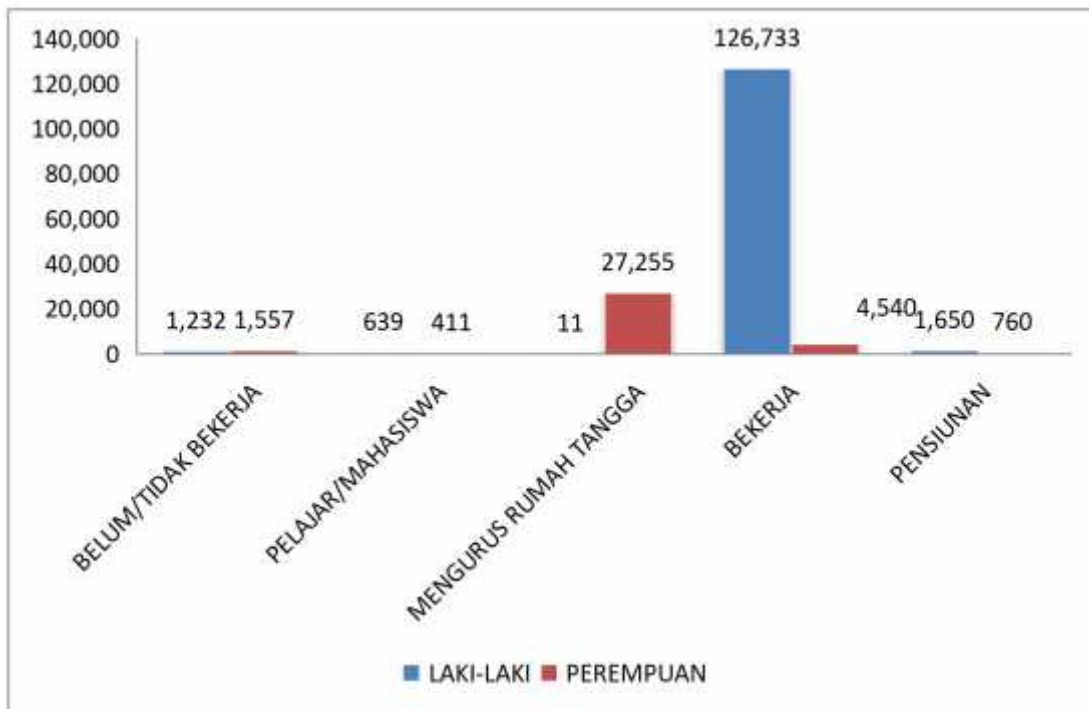
Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Tabel 19. juga menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja (79,66%), sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Proporsi kepala keluarga yang bekerja laki-laki (97,29%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (13,15%).

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga lebih rendah yakni 0,01% daripada kepala keluarga perempuan yakni 78,95%. Selain itu, terdapat kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 1,46% dengan proporsi kepala keluarga laki-laki lebih rendah yakni 1,27% daripada kepala keluarga perempuan yakni 2,20%. Selain itu yang perlu menjadi perhatian adalah adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja yakni 1,69% dan kepala keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa yakni 0,64%.



Grafik 17. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin





BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas pembangunan manusia diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (**melek huruf dan rata-rata lama sekolah**), kesehatan (**angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir**) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

A. Kelahiran dan Kematian

1. Rasio Anak dan Perempuan (**Child Women Ratio/CWR**)

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

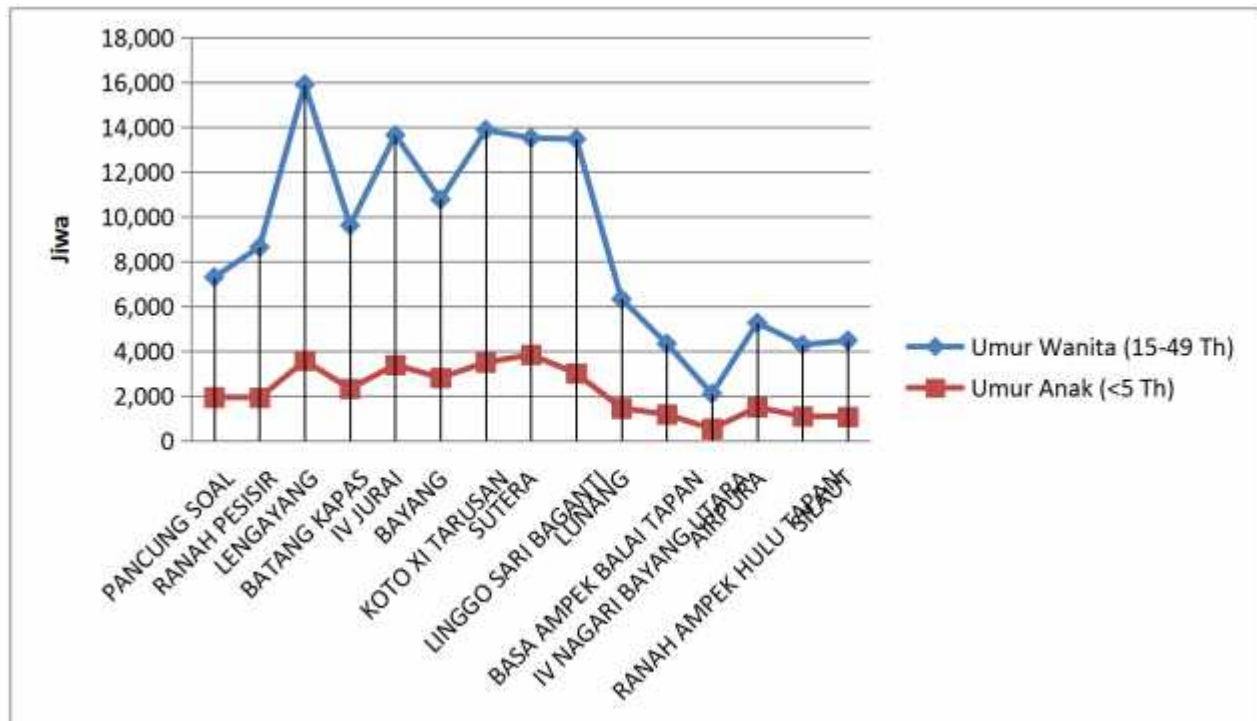
Tabel 20. Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Tahun

KECAMATAN	UMUR WANITA (15-49 TH)	UMUR ANAK (<5 TH)	CWR
PANCUNG SOAL	7,297	1,935	26.5
RANAH PESISIR	8,643	1,916	22.2
LENGAYANG	15,895	3,572	22.5
BATANG KAPAS	9,612	2,320	24.1
IV JURAI	13,634	3,388	24.8
BAYANG	10,762	2,806	26.1
KOTO XI TARUSAN	13,862	3,496	25.2
SUTERA	13,507	3,834	28.4
LINGGO SARI BAGANTI	13,460	3,003	22.3
LUNANG	6,320	1,453	23.0
BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,326	1,170	27.0
IV NAGARI BAYANG UTARA	2,098	533	25.4
AIRPURA	5,258	1,487	28.3
RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,277	1,086	25.4
SILAUT	4,465	1,062	23.8
TOTAL KABUPATEN	133,416	33,061	24.8

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Grafik 18. Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Th



Pada tahun 2024, besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 24,8 CWR. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 24 atau 25 jiwa balita umur < 5 tahun. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup rendah karena masih kecilnya jumlah anak balita. CWR tertinggi di Kecamatan Sutera sebesar 28,4 CWR, sedangkan CWR terendah di Kecamatan Ranah Pesisir yaitu sebesar 22,2 CWR.

B. Ekonomi

1. Angkatan Kerja menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan Kerja (**labor force**) adalah penduduk usia 15 tahun keatas (**Tenaga Kerja/ manpower**) dan tidak termasuk didalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Angkatan Kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (**employed**) dan mencari pekerjaan/menganggur (**unemployed**).



Tabel 21. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (15 - 64 Tahun)

KELOMPOK UMUR	TENAGA KERJA	ANGKATAN KERJA			BUKAN ANKATAN KERJA	ANGKA PENYERAPAN ANKATAN KERJA
		TIDAK BEKERJA	BEKERJA	JML		
15-19	41,378	3,141	77	3,218	38,160	7.8
20-24	48,457	4,813	2,936	7,749	40,708	16.0
25-29	41,970	5,702	12,538	18,240	23,730	43.5
30-34	34,128	2,442	17,459	19,901	14,227	58.3
35-39	36,325	1,411	19,937	21,348	14,977	58.8
40-44	38,347	700	20,799	21,499	16,848	56.1
45-49	36,105	399	19,514	19,913	16,192	55.2
50-54	30,017	247	16,462	16,709	13,308	55.7
55-59	26,513	234	14,910	15,144	11,369	57.1
60-64	22,245	190	11,347	11,537	10,708	51.9
TOTAL	355,485	19,279	135,979	155,258	200,227	43.7

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari Tabel. 21. nampak bahwa jumlah tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 355.485 jiwa (usia 15 – 64 tahun) dan jumlah angkatan kerja sebesar 200.227 jiwa. Angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu 21.499 orang, diikuti kelompok umur 25-29 tahun sebesar 23.147 orang dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 3.218 orang. Terlihat juga bahwa 43,7% dari angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan telah berpartisipasi dalam pasar kerja, yang dapat diartikan 43,7% penduduk usia 15-64 tahun terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha produktif. Semakin tinggi Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) berarti semakin banyak penduduk Angkatan Kerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha produktif. APAK Kabupaten Pesisir Selatan tertinggi ada pada kelompok umur 35 – 39 tahun yaitu 58,8%.

Pemerintah daerah perlu perhatikan adalah sebanyak 3.218 jiwa penduduk angkatan kerja berusia muda yaitu 15-19 tahun. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja, Jika kelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka.



2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (**baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja**), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 22. Angka Pengangguran

KECAMATAN	ANGKATAN KERJA		TIDAK BEKERJA		% TINGKAT PENGANGGURAN
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
PANCUNG SOAL	8,009	5.2	1,114	5.8	13.9
RANAH PESISIR	9,485	6.1	925	4.8	9.8
LENGAYANG	18,570	12.0	2,549	13.2	13.7
BATANG KAPAS	10,441	6.7	1,507	7.8	14.4
IV JURAI	16,549	10.7	1,420	7.4	8.6
BAYANG	12,403	8.0	1,650	8.6	13.3
KOTO XI TARUSAN	15,718	10.1	2,430	12.6	15.5
SUTERA	18,049	11.6	2,489	12.9	13.8
LINGGO SARI BAGANTI	15,467	10.0	2,313	12.0	15.0
LUNANG	7,586	4.9	701	3.6	9.2
BASA AMPEK BALAI TAPAN	5,042	3.2	580	3.0	11.5
IV NAGARI BAYANG UTARA	2,314	1.5	236	1.2	10.2
AIRPURA	5,672	3.7	637	3.3	11.2
RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,638	3.0	332	1.7	7.2
SILAUT	5,315	3.4	396	2.1	7.5
TOTAL KABUPATEN	155,258	100.0	19,279	100.0	12.4

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Tabel. 22, menunjukkan angkatan kerja yang menganggur menurut kecamatan memperlihatkan bahwa pengangguran tertinggi berada di **Kecamatan Koto XI Tarusan 15,5%** dari angkatan kerja, diikuti **Linggo Sari Baganti 15,0%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Batang Kapas 14,4%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Pancung Soal 13,9%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Sutera 13,8%** dari angkatan kerja, **Lengayang 13,7%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Bayang 13,3%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 11,5%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Airpura 11,2%** dari angkatan kerja, **Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 10,2%** dari angkatan kerja, **Kecamatan Ranah Pesisir 9,8%** dari angkatan kerja, dan **Kecamatan Lunang 9,2%** dari angkatan kerja,



Kecamatan IV Jurai 8,6% dari angkatan kerja, **Kecamatan Silaut 7,5%** dari angkatan kerja, dan yang paling rendah angkatan kerjanya adalah **Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 7,2%** dari angkatan kerjanya. Hal ini wajar karena Kecamatan Silaut merupakan Kecamatan yang paling ujung dari Kabupaten Pesisir Selatan, namun demikian perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah terhadap angkatan kerja.

Grafik 19. Angka Pengangguran





BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk mempunyai pengertian pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap seperti : mobilitas ulang alik (komunitas) dan migrasi. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain atau suatu daerah ke daerah lain.

Laju pertumbuhan penduduk alamiah sudah bisa diturunkan dengan pengendalian kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk mulai memperoleh perhatian. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi seperti terorisme, konflik sosial, konflik antar suku yang semua disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Selama ini belum memperoleh perhatian dari pemerintah. Padahal mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan.

Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi dan mobilitas non permanen. Mobilitas penduduk permanen di Indonesia sudah banyak diteliti dan dianalisis oleh berbagai ahli kependudukan, sedangkan penelitian mobilitas non permanen secara makro belum banyak dilakukan karena keterbatasan data yang ada. Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di daerah asal maupun di daerah tujuan. Oleh sebab itu pengarahannya perlu dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial.

1. Mobilitas Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Atau dengan kata lain, migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (**push factor**) suatu



wilayah dan daya tarik (**pull factor**) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya.

2. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar

Migrasi penduduk keluar Kabupaten Pesisir Selatan (pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang tahun 2024 adalah 40.416 orang yang terdiri dari 10.013 orang pindah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan 30.403 orang pindah ke luar Provinsi Sumatera Barat. Jika diperhatikan menurut kecamatan maka penduduk pindah terbesar di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu 7.577 orang yang terdiri dari 1.931 orang pindah ke luar Kabupaten Pesisir Selatan ke daerah dalam Provinsi Sumatera Barat sedangkan 5.646 orang keluar Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang paling sedikit sebanyak 346 orang yang terdiri dari 68 pindah ke kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan 278 orang keluar Provinsi Sumatera Barat.

Sementara penduduk datang menurut kecamatan maka penduduk datang terbesar di Kecamatan IV Jurai yaitu 6.405 yang terdiri dari 2.498 orang datang dari Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan 3.907 orang datang dari luar Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang paling sedikit penduduk datang menurut kecamatan maka penduduk datang terkecil di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebanyak 557 orang yang terdiri dari 41 datang ke kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan 516 orang keluar Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel 23.



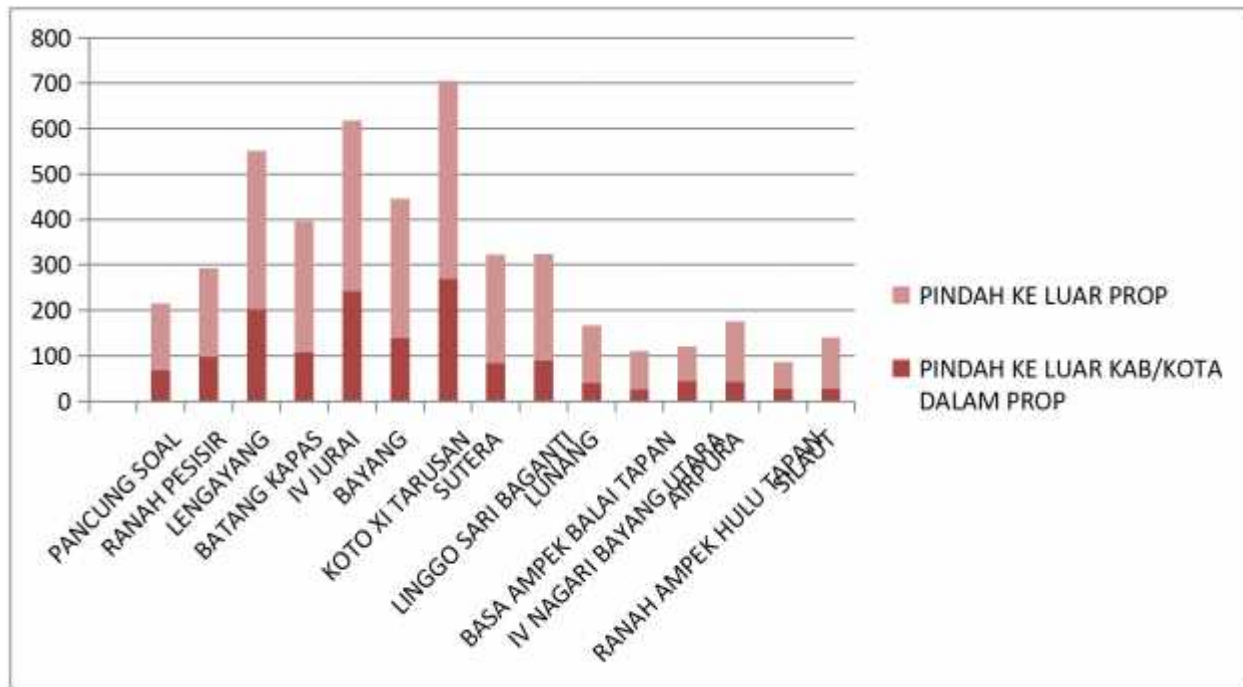
Tabel 23. Penduduk Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi

KECAMATAN	PENDUDUK PINDAH			PENDUDUK DATANG		
	PINDAH KE LUAR KAB/KOTA DALAM PROP	PINDAH KE LUAR PROP	JUMLAH	DATANG DARI KAB/KOTA DALAM PROP	DATANG DARI LUAR PROP	JUMLAH
PANCUNG SOAL	68	147	215	70	75	145
RANAH PESISIR	97	196	293	75	117	192
LENGAYANG	202	350	552	95	228	323
BATANG KAPAS	107	289	396	74	142	216
IV JURAI	242	376	618	200	221	421
BAYANG	139	307	446	106	245	351
KOTO XI TARUSAN	268	437	705	190	218	408
SUTERA	84	238	322	71	150	221
LINGGO SARI BAGANTI	89	235	324	75	195	270
LUNANG	40	127	167	18	84	102
BASA AMPEK BALAI TAPAN	25	86	111	12	45	57
IV NAGARI BAYANG UTARA	44	76	120	14	49	63
AIRPURA	42	133	175	60	73	133
RANAH AMPEK HULU TAPAN	27	60	87	6	72	78
SILAUT	27	113	140	15	96	111
TOTAL	1,501	3,170	4,671	1,081	2,010	3,091

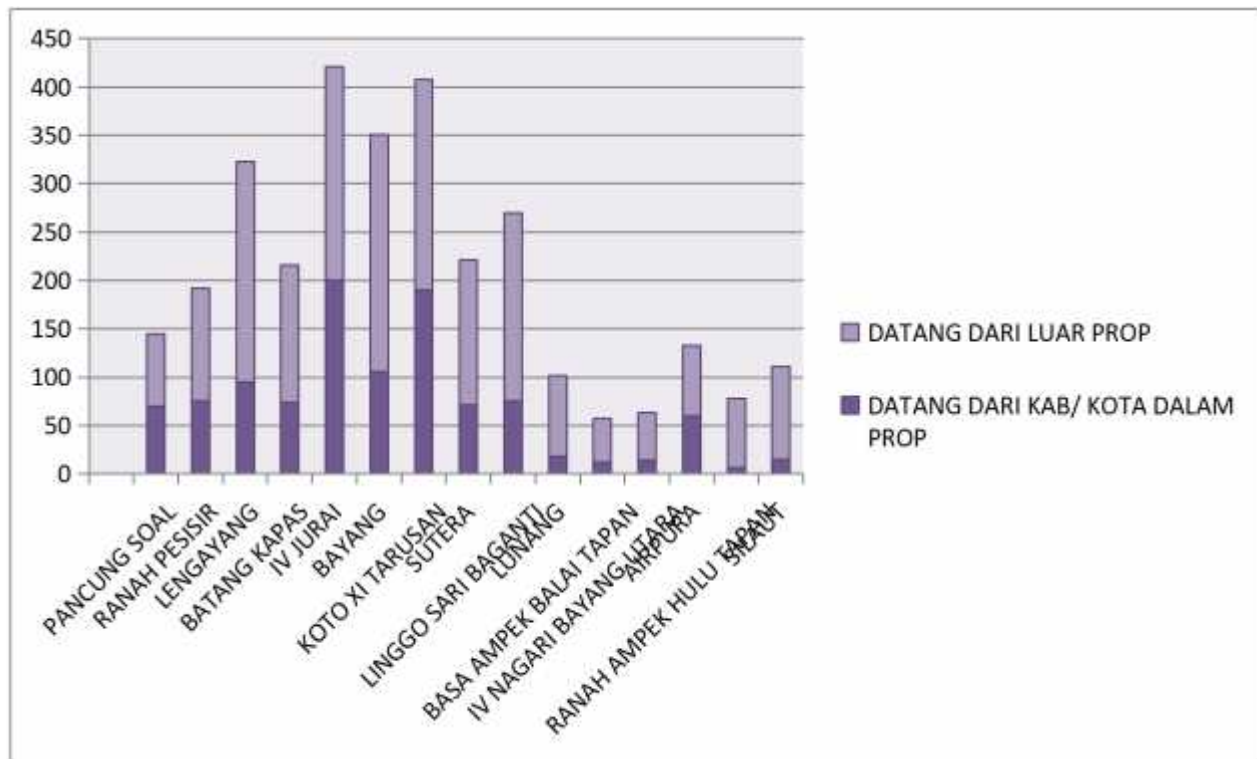
Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Grafik 20. Penduduk Pindah Ke Kab/Kota Dalam Prop dan Ke Luar Prop



Grafik 21. Penduduk Datang Dari Kab/Kota Dalam Prop dan Dari Luar Prop





BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

Pemerintah Daerah sudah berupaya melakukan pelayanan publik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dokumen kependudukan memperkuat database penduduk serta pelayanan publik. Kepemilikan dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian dan surat dokumen kependudukan lainnya mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan



hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel. 24 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga SIAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari 136.603 keluarga ternyata 131.489 keluarga telah memiliki Kartu Keluarga SIAK. Hanya 5.114 keluarga yang tidak memiliki KK SIAK, ini artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dalam mengajak masyarakat untuk memiliki KK, sehingga hal ini perlu dilanjutkan dan lebih memotivasi lagi masyarakat untuk memiliki KK.

Bila menurut kecamatan, maka persentase kepemilikan KK SIAK yang paling tinggi adalah Kecamatan Lengayang (12.9%) dan paling sedikit kepemilikan KK SIAK adalah IV Nagari Bayang Utara (1.9%), sedangkan paling tinggi belum cetak KK SIAK adalah Kecamatan Lengayang 763 (0.6%) dan sedikit belum cetak KK SIAK adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 100 (0.1%) dan Kecamatan Silaut 108 (0.1%).

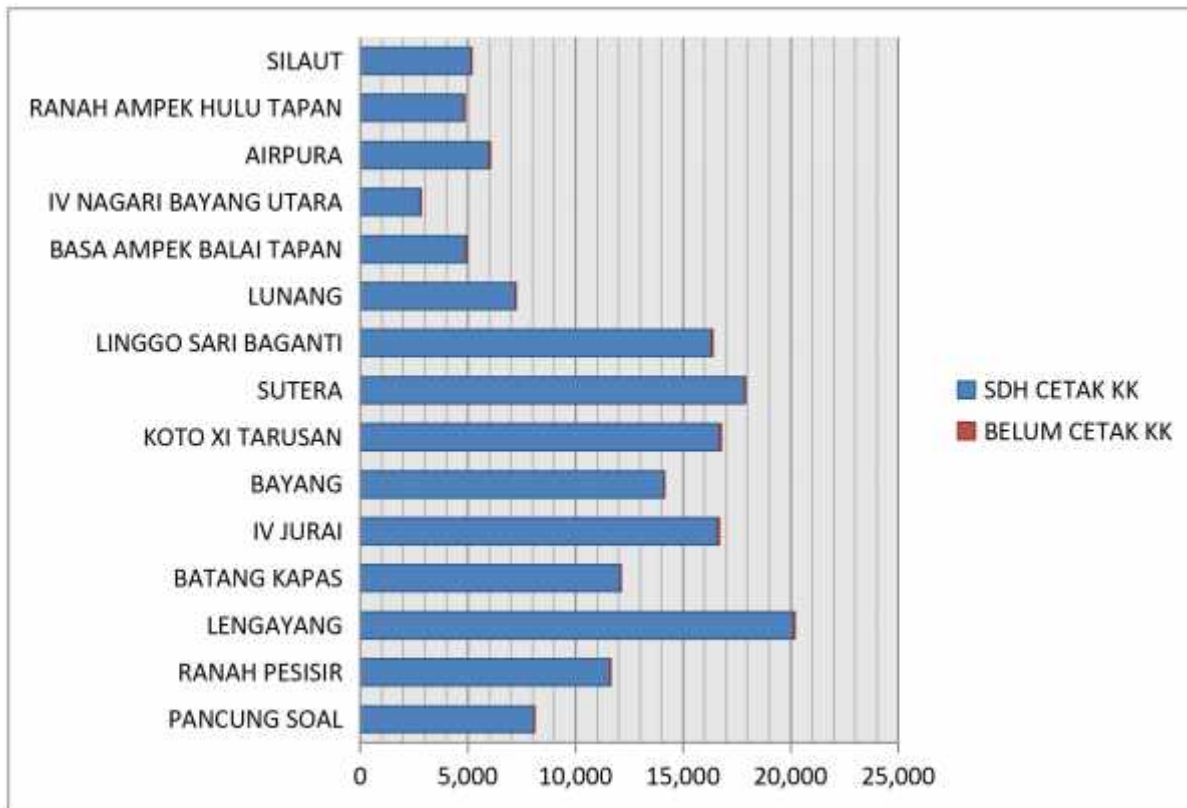
Tabel 24. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

NO_KEC	KECAMATAN	SDH CETAK KK		BELUM CETAK KK		KARTU KELUARGA	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
01	PANCUNG SOAL	8,058	4.0	21	0.1	8,079	4.2
02	RANAH PESISIR	11,621	6.6	30	0.2	11,651	6.8
03	LENGAYANG	20,139	12.4	47	0.6	20,186	12.9
04	BATANG KAPAS	12,077	7.9	37	0.3	12,114	8.2
05	IV JURAI	16,616	9.8	63	0.3	16,679	10.1
06	BAYANG	14,123	8.5	30	0.3	14,153	8.8
07	KOTO XI TARUSAN	16,715	9.8	49	0.4	16,764	10.2
8	SUTERA	17,858	10.8	39	0.4	17,897	11.2
09	LINGGO SARI BAGANTI	16,324	9.4	50	0.4	16,374	9.7
10	LUNANG	7,193	4.1	11	0.1	7,204	4.3
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,903	2.9	8	0.2	4,911	3.2
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,796	1.8	5	0.1	2,801	1.9
13	AIRPURA	5,972	3.0	29	0.1	6,001	3.1
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,809	2.4	9	0.2	4,818	2.6
15	SILAUT	5,147	2.8	9	0.1	5,156	2.9
	TOTAL KAB/KOTA	164,351	96.3	437	3.7	164,788	100.0

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Grafik 22. Kepemilikan Kartu Keluarga



B. Kepemilikan Akte Kelahiran

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Faktor atau penyebab kegagalan pencatatan anak salah satunya adalah kealpaan pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.



Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Hak-hak Anak diberbagai Undang-Undang, antara lain UU No. 39/1999 tentang HAM maupun UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni : menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

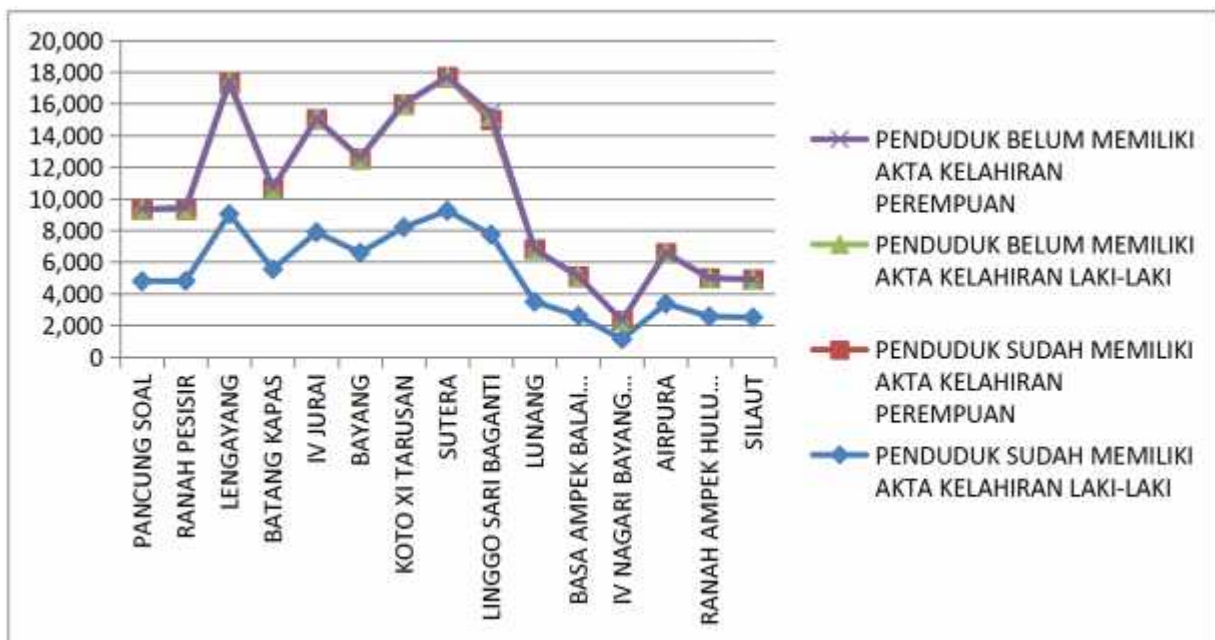


Tabel 25. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun

NO_KEC	KECAMATAN	PENDUDUK SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			PENDUDUK BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK+PR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK+PR
01	PANCUNG SOAL	4,793	4,530	9,323	18	12	30
02	RANAH PESISIR	4,810	4,496	9,306	66	56	122
03	LENGAYANG	9,033	8,258	17,291	80	54	134
04	BATANG KAPAS	5,551	5,115	10,666	12	11	23
05	IV JURAI	7,882	7,153	15,035	14	18	32
06	BAYANG	6,587	5,954	12,541	25	25	50
07	KOTO XI TARUSAN	8,195	7,770	15,965	22	25	47
08	SUTERA	9,239	8,434	17,673	12	10	22
09	LINGGO SARI BAGANTI	7,731	7,244	14,975	246	193	439
10	LUNANG	3,492	3,307	6,799	2	2	4
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2,609	2,485	5,094	12	8	20
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,133	1,178	2,311	1	4	5
13	AIRPURA	3,369	3,194	6,563	11	14	25
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2,565	2,411	4,976	6	1	7
15	SILAUT	2,499	2,402	4,901	2	3	5
	TOTAL KAB/KOTA	81,760	78,185	159,945	182,324	177,767	360,091

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Grafik 23. Kepemilikan Akta Kelahiran





C. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun, tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel. 26, menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP-el.

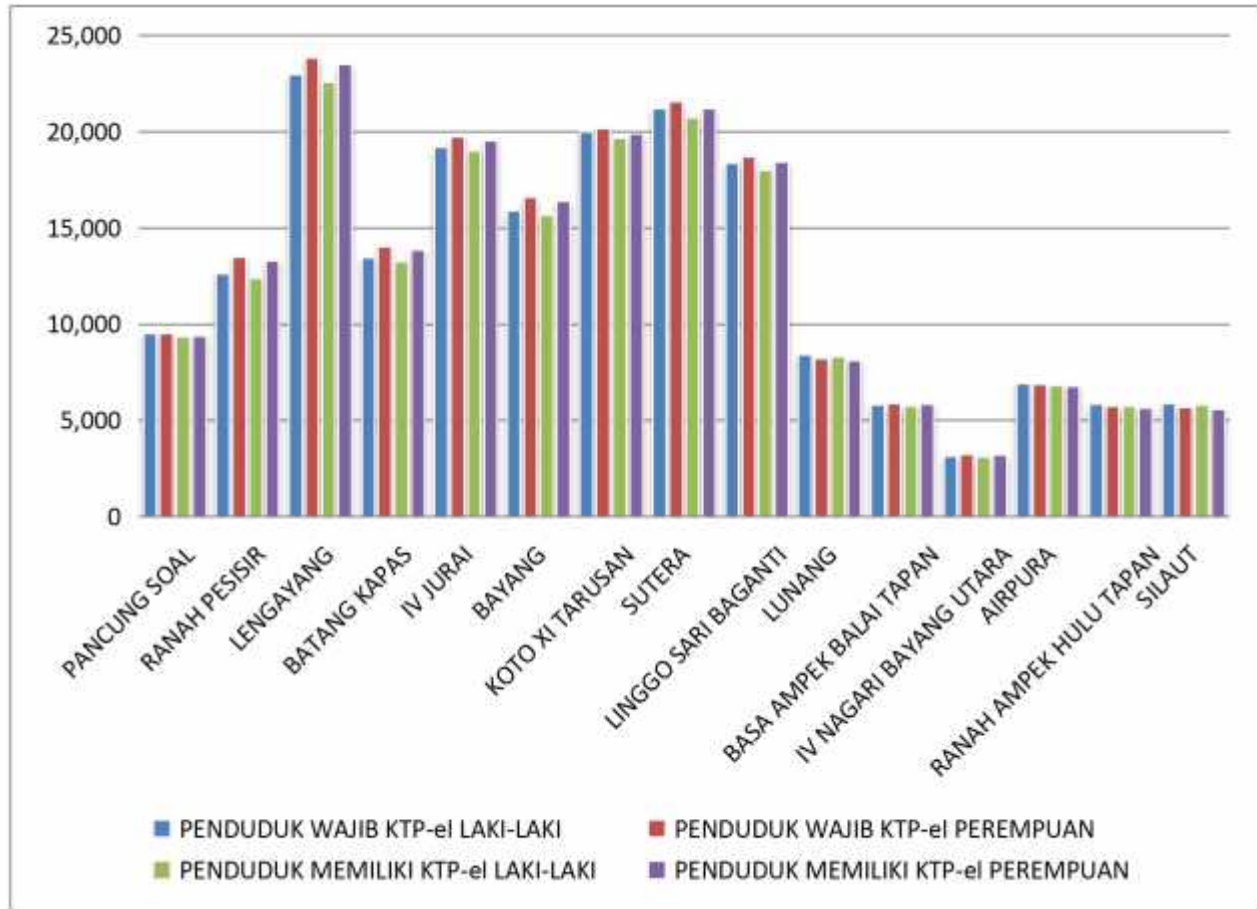
Tabel 26. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

NO_KEC	NAMA_KEC	PENDUDUK WAJIB KTP			PENDUDUK MEMILIKI KPEL		
		LAKI-LAKI	PEREMP UAN	LK+PR	LAKI-LAKI	PEREMP UAN	LK+PR
01	PANCUNG SOAL	9,517	9,520	19,037	9,351	9,394	18,745
02	RANAH PESISIR	12,638	13,493	26,131	12,402	13,302	25,704
03	LENGAYANG	22,970	23,830	46,800	22,590	23,500	46,090
04	BATANG KAPAS	13,468	14,033	27,501	13,264	13,864	27,128
05	IV JURAI	19,209	19,728	38,937	18,989	19,526	38,515
06	BAYANG	15,888	16,584	32,472	15,669	16,399	32,068
07	KOTO XI TARUSAN	19,994	20,168	40,162	19,657	19,906	39,563
08	SUTERA	21,197	21,565	42,762	20,753	21,205	41,958
09	LINGGO SARI BAGANTI	18,383	18,715	37,098	18,018	18,432	36,450
10	LUNANG	8,400	8,225	16,625	8,303	8,110	16,413
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5,824	5,884	11,708	5,740	5,831	11,571
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	3,141	3,252	6,393	3,097	3,198	6,295
13	AIRPURA	6,925	6,868	13,793	6,814	6,763	13,577
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5,842	5,745	11,587	5,733	5,641	11,374
15	SILAUT	5,894	5,663	11,557	5,817	5,587	11,404
	TOTAL KABUPATEN	189,290	193,273	382,563	186,197	190,658	376,855

Sumber : Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024



Grafik 24. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)





BAB VII

PENUTUP

Profil kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan ini akan disajikan secara berkala, dimasa mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih akurat dan valid, antara lain dengan mempererat lagi system koordinasi bersama dinas/instansi yang lain bersama. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri masyarakat sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan yang sudah terpusat ke Datacenter di Departemen Dalam Negeri, dimana data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status penduduk Kabupaten Pesisir Selatan secara on-line. Data tersebut sudah dapat memberikan rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pihak pengguna dalam hal seperti ; Pemanfaatan Pelayanan Publik, Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan, Pemanfaatan Alokasi Anggaran, Pemanfaatan Pembangunan Demokrasi dan Pemanfaatan Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Kami menyadari bahwa buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan profil kependudukan mendatang, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sangat kami harapkan.